

REPUBLIK INDONESIA



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Kementerian Agama

KREASI

Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia

14 Agustus 2024

Versi Terjemahan Bahasa Indonesia oleh
Tosman Efendi dan Anggi Maulana Nasution
[Klik Disini](#) untuk Versi Resmi dalam Bahasa Inggris

Dukungan Keuangan oleh **Global Partnership for Education**
Dukungan Koordinasi oleh **PSPK** (sebagai *Co-Coordinating Agency*)
Agen Pengelolaan Hibah dan Implementasi oleh
Save the Children Australia & Indonesia



Daftar Isi

Akronim	3
Konteks Negara	5
Pendidikan di Indonesia	5
Akses.....	6
Pembelajaran	7
Kesejahteraan Anak.....	9
Isu Lintas Sektor: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).....	9
Isu Lintas Sektor: Perubahan Iklim	10
Kerangka Kebijakan Pendidikan	12
Merdeka Belajar	12
Respon: KREASI	15
Penargetan	18
Desain Program.....	24
Tujuan Program.....	25
Hasil 1: Kurikulum dan Asesmen	25
Hasil 2: Praktik Pengajaran.....	33
Hasil 3: Kepemimpinan Pendidikan	39
Hasil 4: Perlindungan Anak	46
Aturan Pelaksanaan.....	51
Susunan Pelaksanaan Tingkat Kabupaten.....	54
Kesiapan Program	59
Pengelolaan Keuangan	59
Pengadaan	60
<i>Research, Evaluation, Accountability, Learning and Monitoring</i> (Penelitian, Evaluasi, Akuntabilitas, Pembelajaran, dan Moniroting).....	62
Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan	66
Perlindungan Anak (termasuk PSEAH - Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual) ...	66
Perlindungan Orang Dewasa (Perempuan dan Orang Dewasa Rentan Lainnya, termasuk PSEAH)	67
Keberlanjutan dan Efektivitas Hibah	68

Akronim

RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	OECD	<i>Organisations for Economic Cooperation and Development</i>
3T	Terdepan, Terluar dan Tertinggal	PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ACER	<i>Australian Council for Education Research</i> [Dewan Penelitian Pendidikan Australia]	PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
AKMI	Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia	PBS	Profil Belajar Siswa
AN	Asesmen Nasional	PC	<i>Partnership Compact</i> [Pakta Kemitraan]
APK	Angka Partisipasi Kasar	PDIA	<i>Problem Driven Iterative Adaptation</i> [Adaptasi Iteratif Berbasis Masalah]
APM	Angka Partisipasi Murni	PGP	Program Guru Penggerak
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
BGP	Balai Guru Penggerak	PKB	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
BOP PAUD	Bantuan Operasional PAUD	PMM	Platform Merdeka Mengajar
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	PMU	<i>Project Management Unit</i> [Unit Manajemen Proyek]
CCE	<i>Climate Change Education</i> [Pendidikan Perubahan Iklim]	PPG	Pendidikan Profesi Guru
CoC	<i>Code of Conduct</i> [Kode Etik]	PSPK	Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan
CSO	<i>Civil Society Organisation</i> [Organisasi Masyarakat Sipil]	REALM	<i>Research, Evaluation, Accountability, Learning and Monitoring</i>
CSSF	<i>Comprehensive School Safety Framework</i> [Kerangka Kerja Keselamatan Sekolah yang Komprehensif]	SCA	Save the Children Australia
DFAT	<i>Australian Government Department of Foreign Affairs And Trade</i> [Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia]	SCG	<i>System Capacity Grant</i> [Hibah Kapasitas Sistem]
EFA	<i>Enabling Factors Analysis</i> [Analisis Faktor Pemungkin]	SCIDN	Save the Children Indonesia
INOVASI	Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia	SD/MI	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Kemanag	Kementerian Agama	SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan]
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	SLB	Sekolah Luar Biasa
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMA/MA	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
KKG	Kelompok Kerja Guru	SMK/MAK	Madrasah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
KKKS	Kelompok Kerja Kepala Sekolah	SMP/MTs	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

KM	Kurikulum Merdeka	SP	Sekolah Penggerak
KREASI	Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia	TaRL	<i>Teaching at the Right Level</i> [Mengajar pada Tingkat yang Tepat]
LAYS	<i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> [Lama Sekolah berdasarkan Hasil Belajar]	TK/RA	Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal
LPTK	Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan	TPPK	Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
MB	Merdeka Belajar	TWP	<i>Thinking and Working Politically</i> [Berpikir dan Bekerja Secara Politik]
MG	<i>Multiplier Grant</i> [Hibang Pegganda]	UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
MPI/LEG	Mitra Pendidikan Indonesia/ <i>Local Education Group</i>	WB	<i>World Bank</i> [Bank Dunia]
NGO	<i>Non-Governmental Organisation</i> [Organisasi Non-Pemerintah]		

Konteks Negara

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara paling beragam di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di area seluas 1,9 juta kilometer persegi. Dengan lebih dari 279 juta penduduk, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Keragaman masyarakat terlihat dari 1.340 suku yang tercatat. Masyarakat Indonesia mengakui Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, namun terdapat pula 652 bahasa daerah dan lokal. Dengan sistem pemerintahan terdesentralisasi, Indonesia terdiri dari 38 provinsi (sembilan di antaranya memiliki status otonom) serta 514 kota atau kabupaten. Terletak di 'Cincin Api', Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, dengan sepertiga penduduknya tinggal di daerah rawan banjir.¹

Indonesia memiliki rencana pembangunan nasional yang komprehensif dan kuat. Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN) menguraikan aspirasi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam 15 tahun mendatang. Untuk pertumbuhan dan pembangunan, Indonesia ini mengidentifikasi sejumlah sektor ekonomi yang kompetitif, antara lain sektor berbasis sumber daya alam, pertambangan, teknologi, pertahanan, alat kesehatan, kimia dan farmasi, mesin dan peralatan, serta industri elektronik.² Seiring dengan penurunan sektor pertumbuhan pertanian primer, stabilnya sektor manufaktur sekunder, dan peningkatan sektor pertumbuhan jasa tersier, Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil sejak tingkat pendidikan paling awal.³

Pendidikan di Indonesia

Pendidikan sangat penting di Indonesia karena berperan dalam pengembangan warganya serta mendukung ekonomi yang tumbuh pesat. Indonesia memiliki sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, dengan penyaluran layanan pendidikan yang sangat kompleks melalui dua kementerian berbeda: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Kemendikbudristek merupakan instansi utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan umumnya memimpin reformasi serta kebijakan pendidikan; penyediaan pendidikan sekolah negeri dilakukan secara desentralisasi dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelayanannya. Sementara itu, Kemenag menyelenggarakan pendidikan madrasah atau pendidikan Islam dan melakukan pengawasan terpusat terhadap sekolah-sekolah agama yang sebagian besar didukung oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemenag juga menyediakan kerangka regulasi untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah, di mana sekolah-

¹ Wahyu Wilopo (2022). "Building a disaster-ready culture in Indonesia", Tempo.Co October 8, 2020. <https://en.tempo.co/read/1643117/building-a-disaster-ready-culture-in-indonesia>

² Prime News, "Bappenas Outlines Priority Industries of 2025-2045", June 5, 2023. <https://bappenas.go.id/en/berita/bappenas-jabarkan-industri-prioritas-indonesia-dalam-rpjpn-2025-2045-hWKjg>

³ Universitas Indonesia, Indonesia Economic Outlook (2021). "The Great Escape", <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2020/11/IEO2021-EN.pdf>

sekolah tersebut beroperasi secara nirlaba. Terdapat lebih dari 50 juta siswa di sekolah-sekolah Kemendikbudristek, dan tambahan 10 juta siswa di madrasah (sekolah Islam di bawah Kemenag); 3,3 juta guru, serta tambahan 870.000 guru madrasah; dan lebih dari 430.000 sekolah Kemendikbudristek, serta tambahan 86.000 sekolah Kemenag.⁴ Di bawah Kemendikbudristek, 93% sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 13% sekolah dasar adalah swasta, sedangkan di bawah Kemenag, semua sekolah PAUD adalah swasta dan 6,4% madrasah ibtidaiyah (sekolah dasar) adalah negeri. Kehadiran lembaga pendidikan swasta berkontribusi dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi anak-anak Indonesia, termasuk di daerah pedesaan di mana sekolah negeri tidak tersedia atau jumlahnya tidak mencukupi. Pendidikan swasta di Indonesia diselenggarakan oleh yayasan dan beroperasi secara nirlaba.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 menegaskan hak atas pendidikan gratis dan wajib mulai usia enam hingga lima belas tahun (9 tahun pendidikan wajib), serta pemerintah sedang berupaya untuk memperluas dan menguji coba 12 tahun pendidikan wajib di beberapa provinsi. Selain itu, pada tahun 2022, Pemerintah mengusulkan revisi undang-undang untuk memasukkan satu tahun pendidikan pra-sekolah wajib, yang akan menjadikan total pendidikan wajib selama 13 tahun sebagaimana tercantum dalam draf RPJPN 2020-2045; beberapa pemerintah provinsi telah memberlakukan pendidikan pra-sekolah wajib.

Pendidikan di Indonesia telah berkembang seiring dengan puluhan tahun reformasi pendidikan. Dalam dua puluh tahun terakhir, Rencana Strategis (Renstra) dari Kemendikbudristek dan Kemenag telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Perencanaan strategis pendidikan tersebut menghasilkan:

1. Perluasan akses melalui ekspansi besar-besaran sekolah untuk pendidikan tingkat SMP dan SMA dari tahun 2004–2009;
2. Perluasan akses melalui ekspansi berkelanjutan pendidikan menengah, pengembangan pendidikan teknis dan vokasional, serta peningkatan kualitas melalui percepatan sertifikasi guru, akreditasi sekolah, dan jaminan mutu dari tahun 2010–2014; dan
3. Keberlanjutan peningkatan kualitas dengan pengenalan fokus pada pembelajaran dari tahun 2015–2019.⁵

Renstra 2020–2024 dan reformasi Merdeka Belajar yang sedang berlangsung disajikan di bawah ini dalam Kerangka Kebijakan Pendidikan.

Akses

Indonesia memiliki pendidikan dasar universal untuk sekolah negeri maupun sekolah agama, serta akses yang tinggi ke sekolah menengah pertama. Rata-rata, anak-anak dapat bersekolah

⁴ Aditomo, Anindito (2024). "Laying the Foundations of Systemic Change in Education: Reflections on Indonesia's *Merdeka Belajar* Reform. Presentation at the World Bank March 11, 2024.

⁵ INOVASI. Insights from INOVASI Volume I: Indonesia's Twenty-Year Education Reform Journey. 2023. <https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2023/11/2023-public-INOVASI-Insights-Vol-1-.pdf>

selama 12,4 tahun, dengan perbedaan yang minimal antara anak laki-laki dan perempuan.⁶ Di Indonesia, hampir 30 persen anak penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap pendidikan, dan banyak dari mereka yang bersekolah tidak mendapatkan layanan yang memadai.⁷ Indonesia juga menghadapi tantangan signifikan terkait keakuratan dan kelengkapan data mengenai anak-anak penyandang disabilitas.⁸

Tabel 1: Akses Pendidikan (2023)⁹

	Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Murni
Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal (TK/RA)	49.53	N/A ¹⁰
Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	101.07	92.01
Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)	105.08	79.74
Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah and Sekolah Menengah Kejuruan and Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA, SMK, MA, MAK)	99.02	70.97

Pembelajaran

Meskipun terdapat investasi besar untuk mendukung pendidikan, input yang berkaitan dengan pengembangan profesional guru belum menghasilkan peningkatan hasil belajar selama bertahun-tahun. Kondisi pembelajaran yang buruk telah membawa negara ini ke dalam “krisis pembelajaran yang terus menerus.” Siswa Indonesia memperoleh skor rendah *pada Programme for International Student Assessment (PISA)* dalam bidang membaca, matematika, dan sains, terutama bila dibandingkan dengan skor PISA negara-negara OECD (lihat Gambar 1). Pandemi COVID-19 semakin memperburuk hasil belajar.¹¹ Menurut studi kesenjangan pembelajaran INOVASI yang dilakukan selama pandemi COVID-19, siswa mengalami kehilangan pembelajaran selama enam bulan untuk literasi dan lima bulan untuk numerasi setelah satu tahun penutupan sekolah.¹² Tingkat pembelajaran di antara siswa kelas 1, 2, dan 3 masih rendah, dengan siswa di kelas paling awal menunjukkan kinerja yang paling buruk: 42% siswa kelas 1 berada di bawah

⁶ Bank Dunia (2020). The Promise of Education.

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/658151605203420126/pdf/The-Promise-of-Education-in-Indonesia.pdf>

⁷ Bank Dunia (2024). Bagaimana Indonesia Memastikan Inklusivitas Siswa dengan Disabilitas di Sekolah Pedesaan.

<https://bit.ly/3YmHlxT>

⁸ Berdasarkan Ringkasan *Enabling Factors Partnership Compact* (hal. 11).

⁹ Kemendikbudristek (2024). Sistem Informasi APK-AKM.

https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkpmsekolahmadrasah?kode_wilayah=000000&tahun=2023

¹⁰ Informasi TK/RA tidak disertakan karena tidak tersedia di BPS.

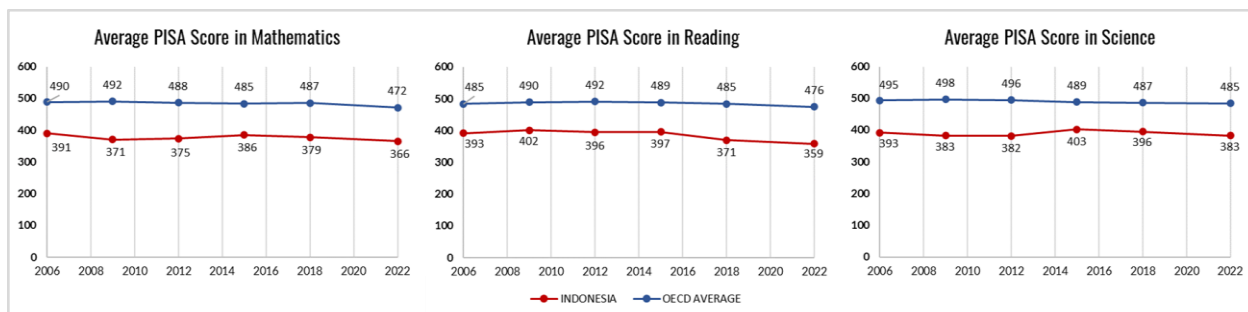
¹¹ DFAT Australia (2023). INOVASI Phase 3 Investment Design Update.

¹² INOVASI (2023). Insights from INOVASI Volume II: INOVASI and the Reform of Indonesian Education.

<https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2023/11/2023-public-INOVASI-insights-from-INOVASI-vol-2.pdf>

yang diharapkan untuk literasi dan 54% siswa kelas 1 berada di bawah yang diharapkan untuk numerasi.¹³

Gambar 1: Skor PISA Rata-Rata Indonesia di Bidang Matematika, Membaca dan Sains (2006-2022)¹⁴



Namun, hasil PISA 2022 menunjukkan adanya peningkatan peringkat Indonesia, yang naik rata-rata dari peringkat ke-72 dari 78 negara/wilayah pada tahun 2018 menjadi peringkat ke-69 dari 81 negara/wilayah pada tahun 2022.¹⁵ Kenaikan peringkat ini dianggap terutama sebagai hasil dari Kurikulum Darurat Kemendikbudristek selama pandemi, yaitu kurikulum sederhana yang baru diterapkan dan memungkinkan guru untuk lebih fokus pada pembelajaran dasar, terutama dalam literasi dan numerasi bagi siswa. Sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Darurat mengalami kehilangan pembelajaran selama satu bulan, dibandingkan dengan lima bulan pada sekolah yang tidak menerapkannya.¹⁶ Menurut Rapor Pendidikan Nasional 2023 yang bersumber dari Asesmen Nasional (AN), 61,53% siswa sekolah dasar di Indonesia telah menunjukkan keterampilan literasi minimal (naik dari 53,42% pada tahun 2021) dan 46,47% siswa sekolah dasar telah menunjukkan keterampilan numerasi minimal (naik dari 30,66% pada tahun 2021).

Meskipun ada peningkatan, temuan PISA 2022 masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan skor asesmen nasional terbaru tetap menunjukkan kekurangan dalam hasil belajar. Rendahnya hasil belajar berarti bahwa meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam akses pendidikan yang menyebabkan peningkatan rata-rata tahun sekolah, anak-anak memiliki *Learning Adjusted Years of Schooling* (LAYS) yang rendah. Menurut Bank Dunia (WB), LAYS bagi anak-anak Indonesia adalah 7,8 tahun, 8 tahun untuk anak perempuan, dan 7,6 tahun untuk anak laki-laki, dibandingkan dengan 12,4 tahun yang sebenarnya mereka tempuh di sekolah.¹⁷

¹³ Ibid.

¹⁴ OECD (2024). PISA Data Explorer. Data diolah oleh Save the Children Indonesia. <https://bit.ly/3yk9rod>; <https://bit.ly/3WKOqwg>; <https://bit.ly/3YwyoaR>.

¹⁵ OECD (2024). PISA Data Explorer. <https://bit.ly/3yk9rod>; <https://bit.ly/3WKOqwg>; <https://bit.ly/3YwyoaR>.

¹⁶ Kemendikbudristek (2023) Peluncuran PISA 2022. <https://www.youtube.com/live/2d91H96NfMw?si=JwslSenP9yszKUGP>

¹⁷ Bank Dunia. Human Capital Project: Indonesia. 2020. https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/hci/HCI_2pager_IDN.pdf

Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak secara keseluruhan juga menyoroti perbedaan signifikan antara anak laki-laki dan perempuan, seperti tingginya (meskipun menurun) angka pernikahan anak pada perempuan, perundungan dan kekerasan fisik pada anak laki-laki, serta kekerasan emosional dan seksual yang dialami anak perempuan.¹⁸ Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2018, dua dari tiga anak, baik perempuan maupun laki-laki, telah mengalami semacam kekerasan.¹⁹ Survei pada tahun 2021 menunjukkan penurunan prevalensi kekerasan, namun kekerasan seksual dan emosional masih lebih banyak dialami oleh anak perempuan. Di tingkat sekolah, perundungan fisik atau emosional oleh teman sebaya—baik secara langsung maupun daring—terjadi pada 40% anak usia 15 tahun, yang mengakibatkan rendahnya skor hasil belajar, trauma psikologis, dan bahkan kasus bunuh diri.²⁰

Isu Lintas Sektor: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Kemendikbudristek dan Kemenag menghadapi tantangan serius dalam mencapai hasil yang merata. Meskipun terdapat kesetaraan gender dalam pendaftaran pendidikan di tingkat nasional bagi anak usia 7–12 tahun, terdapat perbedaan signifikan di tingkat subnasional pada jenjang pendidikan menengah atas, di mana beberapa daerah lebih mengutamakan anak perempuan dan daerah lain lebih mengutamakan anak laki-laki.²¹ Perbedaan gender juga terlihat di kalangan tenaga pendidik, yang tentunya berdampak pada anak perempuan dan laki-laki. Walaupun 71% guru berjenis kelamin perempuan, mereka masih menghadapi hambatan politik, regulasi, dan budaya dalam mencapai posisi sebagai kepala sekolah.²² Faktanya, hanya 43% kepala sekolah di sekolah dasar di bawah Kemendikbudristek yang berjenis kelamin perempuan, dan persentase tersebut bahkan lebih rendah, yaitu 31%, di madrasah ibtidaiyah di bawah Kemenag.²³

Diperkirakan terdapat dua juta anak penyandang disabilitas di Indonesia, dengan kemungkinan pelaporan yang kurang akurat akibat minimnya data terdisagregasi di tingkat sekolah.²⁴

¹⁸ Yarrow, N. & Afkar, R. "Gender and education in Indonesia: Progress with more work to be done." World Bank blog. 2020. <https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/gender-and-education-indonesia-progress-more-work-be-done>

¹⁹ KemenPPPA (2021). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja. <https://repository.poltekesos.ac.id/items/f1e55d47-cfbb-431d-8158-83b515c49cb4>

²⁰ United Nations Children's Fund. *Bullying in Indonesia: Key Facts, Solution and Recommendations*. 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying>

²¹ Yarrow, N. & Afkar, R. (2020). "Gender and education in Indonesia: Progress with more work to be done." World Bank blog. 2020. <https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/gender-and-education-indonesia-progress-more-work-be-done>

²² Annur, C. M. "Mayoritas Guru di Indonesia adalah Perempuan [The majority of teachers in Indonesia are women]". Databoks. November 11, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/24/mayoritas-guru-di-indonesia-adalah-perempuan>

²³ Yarrow, N. & Afkar, R. (2020). "Gender and education in Indonesia: Progress with more work to be done." World Bank blog. 2020. <https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/gender-and-education-indonesia-progress-more-work-be-done>

²⁴ UNICEF (2023). *Empowering Every Child: Embracing Diversity and Inclusion for All: Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/19746/file/Landscape%20analysis%20on%20children%20with%20disabilities%20in%20Indonesia.pdf>

Menurut UNICEF, 36% anak penyandang disabilitas tidak bersekolah, dan mereka jauh lebih mungkin tidak bersekolah serta tidak menyelesaikan pendidikan dibandingkan dengan siswa tanpa disabilitas.²⁵ Selain itu, keterbatasan kesadaran dan ketersediaan akomodasi membatasi partisipasi akademik dan sosial mereka. Regulasi baru, seperti Permendikbudristek No. 48/2023²⁶ dan Permenag No. 1/2024²⁷, memiliki implikasi signifikan terhadap cara pelaksanaan pendidikan inklusif di semua sekolah dan madrasah. Meskipun undang-undang dan peraturan ini mendukung hak anak penyandang disabilitas, masih terdapat kurangnya koordinasi antar kementerian dan lintas tingkatan pemerintahan yang mengakibatkan kesenjangan layanan dan ketidakmerataan yang berkelanjutan. Secara umum, kesiapan komunitas sekolah dan orang tua dalam mendukung sekolah inklusif belum berjalan dengan baik, dan penilaian lapangan diagnostik mengungkapkan bahwa guru mengkhawatirkan kurangnya pelatihan pendidikan inklusif.

Perbedaan geografis juga sangat mencolok di Indonesia. Kemendikbudristek mengidentifikasi lebih dari 42.000 sekolah yang terletak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).²⁸ Sekolah-sekolah tersebut juga kekurangan kapasitas dan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan reformasi pendidikan tingkat nasional. Sekolah 3T menjadi prioritas pemerintah; namun, pemerintah mengakui tantangan seperti kurangnya infrastruktur dan masalah distribusi guru dalam penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, pergantian kurikulum diberikan masa tenggang yang lebih lama untuk pelaksanaan di daerah-daerah tersebut.²⁹

Meskipun demikian, anak-anak Indonesia yang terdampak oleh ketidaksetaraan dan diskriminasi memiliki kelemahan belajar yang paling besar. Sebuah studi mencatat bahwa siswa laki-laki di daerah pedesaan yang memiliki disabilitas memiliki kesenjangan belajar terbesar, diikuti oleh siswa laki-laki di daerah pedesaan yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama mereka.³⁰

Isu Lintas Sektor: Perubahan Iklim

Degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin mengancam akses pendidikan, di mana anak-anak Indonesia menghadapi risiko penyakit, polusi udara, dan banjir pesisir. Indeks Risiko Iklim Anak UNICEF mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berisiko tinggi, serta merekomendasikan investasi di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi gangguan signifikan dalam sektor pendidikan akibat perubahan iklim, termasuk

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Tentang Akomodasi yang Tepat bagi Pembelajar Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Lembaga Pendidikan Tinggi

²⁸ Bank Dunia (2019). The Promise of Education in Indonesia.

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/968281574095251918/pdf/Overview.pdf>

²⁹ Permendikbudristek No 12/2024 mengizinkan sekolah 3T mengadopsi Kurikulum Merdeka pada tahun 2028, sedangkan sekolah non-3T diharapkan mengadopsinya pada tahun 2027.

³⁰ Pascoe, F., Sukoco, G.A., Arsendy, S., Octavia, L., Purba, R., Sprunt, B., Bryant., C. in INOVASI (2022). A widening gap: Impacts of the COVID-19 Pandemic on Indonesia's Most Marginalized Students.

penutupan sekolah, rusaknya sarana dan prasarana pendidikan, serta terjadinya perpindahan atau pengungsian anak usia sekolah.³¹ Contoh insiden penting mencakup banjir dan longsor di Sumatera pada Maret 2024 yang berdampak pada 40.000 keluarga dan mengungsi lebih dari 11.000 anak, serta gempa bumi besar di Sulawesi Tengah pada Juni 2022 yang merusak 67% sekolah di tiga kabupaten/kota.³²

Kerangka kerja komprehensif untuk pendidikan perubahan iklim (CCE) harus dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat guna mengubah perilaku dan mendorong aksi iklim yang positif. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek dan Kemenag bersama pemangku kepentingan terkait lainnya memulai proses revisi kurikulum nasional untuk mengakomodasi isu perubahan iklim, bencana alam, dan kesiapsiagaan bencana sesuai dengan tingkat usia yang tepat. Bank Dunia di Indonesia menyarankan langkah-langkah tambahan seperti: (a) mengembangkan kompetensi guru dalam CCE melalui peningkatan pengembangan profesional; (b) mengarahkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional; (c) mempromosikan kemitraan untuk membangun kapasitas dan merancang program pembelajaran yang berpusat pada siswa; serta (d) merancang infrastruktur pendidikan yang ramah iklim, tangguh, dan mudah diakses guna memenuhi kebutuhan terkait perubahan iklim.³³ Sebagai tindak lanjut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam pendidikan melalui langkah-langkah seperti memasukkan materi perubahan iklim dalam kurikulum dan memodifikasi standar infrastruktur sekolah, termasuk penggunaan dana alokasi khusus untuk membiayai proses tersebut.³⁴

Kerangka Keamanan Sekolah Komprehensif (CSSF) 2022-2030 atau SPAB, yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dan menerapkan pendekatan “all-hazards” untuk melindungi pendidikan dari berbagai gangguan, termasuk yang diakibatkan oleh perubahan iklim,³⁵ menyediakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengatasi dampak negatif perubahan iklim terhadap pendidikan. Kerangka ini membantu pembuat kebijakan, perencana pendidikan, manajemen sekolah, dan mitra terkait dalam mempromosikan hak anak, keberlanjutan, dan ketahanan di sektor pendidikan. Pendekatan all-hazards diterapkan untuk mengelola risiko, termasuk ancaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim, dengan fokus pada kesiapsiagaan, keselamatan, dan pengurangan risiko bencana di sekolah, serta menjamin praktik inklusif. Tujuannya adalah melindungi siswa, guru, dan masyarakat dari dampak bencana, meningkatkan pengetahuan bencana melalui pendidikan, memperbaiki infrastruktur sekolah, dan mengembangkan program bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sejalan dengan agenda

³¹ Save the Children (2021). Born into the climate crisis. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/executive-summary_born-into-the-climate-crisis.pdf/

³² Save the Children (2023). Thousands Of Children Are Still Attending Classes in Often Crowded Temporary Learning Centres with Many Too Scared To Return To Their Damaged Schools.

³³ Bank Dunia (2022). Climate Change Education and Curriculum Revision. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099508210122242652/pdf/IDU0f1386e7708873047a7098a0006c0e3a8b8a9.pdf>

³⁴ Antara News Agency (2023). Kurikulum Merdeka to Build Climate Awareness. Retrieved on July 30, 2024 from <https://en.antaranews.com/news/293943/merdeka-curriculum-to-build-climate-awareness-ministry>

³⁵ GADRRRES (2022). Kerangka Kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang Komprehensif Tahun 2022-2030. <https://spab.kemdikbud.go.id/web/files/Kerangka%20kerja%20spab-Bahasa-CSSF.pdf>

global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, dan Perjanjian Paris, CSSF menekankan pendekatan “seluruh komunitas.”

Kerangka Kebijakan Pendidikan

Sebagai respons terhadap tantangan pendidikan yang telah diidentifikasi, Renstra Kemendikbudristek dan Kemenag (2020–2024) menetapkan peningkatan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas melalui perbaikan proses pembelajaran sebagai tujuan utama. Empat tujuan utama tersebut adalah:

1. Memperluas akses kepada pendidikan berkualitas bagi siswa secara merata dan inklusif;
2. Memperkuat mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada pengembangan siswa;
3. Mengembangkan potensi siswa melalui pendidikan karakter; dan
4. Melestarikan serta mempromosikan budaya, bahasa, dan sastra serta mengarusutamakan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan.

Landasan pembelajaran akan ditingkatkan melalui delapan strategi relevan untuk konteks pendidikan saat ini, yaitu:

1. Memperkuat pengajaran matematika, literasi, dan sains di semua jenjang;
2. Memperkuat literasi di tingkat awal dan pengembangan bentuk-bentuk literasi baru (digital, data, dan literasi sosial);
3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
4. Memperkuat mutu asesmen siswa, terutama asesmen di kelas dan pemanfaatan data asesmen untuk meningkatkan proses pembelajaran;
5. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh dan daring;
6. Mengintegrasikan soft skills ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran;
7. Meningkatkan mutu pendidikan karakter, agama, dan kewarganegaraan; serta
8. Meningkatkan mutu pendidikan nonformal dan pendidikan literasi bagi dewasa.

Merdeka Belajar

Untuk mencapai tujuan Renstra, Kemendikbudristek telah memulai proses reformasi pendidikan yang ambisius dan komprehensif yang dikenal dengan Merdeka Belajar (MB). Kemenag juga menyetujui reformasi ini dan telah menerbitkan peraturan menteri sendiri agar sejalan dengan MB. Dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang menyenangkan, ambisi MB telah menghasilkan 27 kebijakan utama sejak tahun 2020. Sejak peluncuran MB, Kemendikbudristek dan Kemenag telah menginisiasi empat perubahan transformasional utama untuk mendorong pembelajaran, yaitu:

1. Membangun konsensus seputar pembelajaran siswa;
2. Memberikan otonomi dan memberdayakan pemangku kepentingan pendidikan dengan sumber daya untuk pembelajaran;

3. Membuat pemangku kepentingan pendidikan bertanggung jawab atas pembelajaran siswa; dan
4. Mengidentifikasi, melatih, serta memberdayakan guru sebagai agen perubahan (**yang dijelaskan secara rinci dalam komponen Praktik Pengajaran di halaman 32**).³⁶

Membangun konsensus seputar pembelajaran siswa. Perubahan pertama berfokus pada pengukuran hasil belajar. Kemendikbudristek telah mulai menyediakan Rapor Pendidikan kepada pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, yang memuat laporan personalisasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dari asesmen nasional berbasis sampel mengenai literasi dan numerasi dasar serta pembentukan karakter, selain data relevan lainnya terkait kinerja kepala sekolah dan guru. Data ini dimaksudkan untuk membantu unit dan dinas pendidikan di sekolah dalam mengidentifikasi capaian serta permasalahan mendasar, kemudian merancang langkah perbaikan yang berbasis data. Di luar tingkat sekolah, setiap wilayah juga akan memiliki Rapor Pendidikan daerah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Akhirnya, Kemendikbudristek memiliki Rapor Pendidikan nasional untuk menilai kinerja kementerian dalam penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, rapor ini mengevaluasi efektivitas kebijakan yang bertujuan meningkatkan pemerataan pendidikan, yang telah menunjukkan hasil positif.³⁷

Memberikan otonomi dan memberdayakan pemangku kepentingan pendidikan dengan sumber daya untuk pembelajaran. Pendekatan kedua mengubah sifat dari kurikulum dan asesmen. Belajar dari keberhasilan Kurikulum Darurat selama pandemi COVID-19—yang berfokus pada keterampilan dasar melalui pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan, asesmen berbasis kelas, kepemimpinan sekolah yang kuat, dan keterlibatan orang tua untuk memberikan pemulihan pembelajaran yang lebih cepat—Kemendikbudristek menciptakan Kurikulum Merdeka (KM). Pada Maret 2024, KM menjadi kurikulum resmi melalui Peraturan Menteri No. 12/2024 tentang “Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah.”^{38&39} KM bertujuan untuk mengembangkan kompetensi akademik dan karakter semua siswa agar menjadi pembelajar seumur hidup dengan nilai-nilai Pancasila. KM menawarkan pendekatan pendidikan transformasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik dan berpusat pada siswa. Kurikulum yang disusun ulang ini secara mendasar bergeser dari kurikulum komprehensif berbasis kompetensi ke kurikulum yang lebih terkonsentrasi dan terlokalisasi dengan prioritas pada keterampilan dasar. KM memberikan otonomi lebih kepada guru, sehingga

³⁶ Kemendikbudristek (2024). Laying the Foundations of Systemic Change in Education: Reflections on Indonesia’s Merdeka Belajar Reform. https://pskp.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/buku/1714971310_Anindito_Aditomo_Reflections_on_Indonesia%E2%80%99s_Merdeka_Belajar_Reform.pdf

³⁷ Kemendikbudristek (2024). Forum on Education Learning Transformation (FELT) 2024. <https://www.youtube.com/live/6f6SKGLcFt0?si=9ClzMmE8aJpuJbXQ&t=18390>

³⁸ Peraturan Menteri tersebut mencakup seluruh spektrum pendidikan, termasuk madrasah, yang memungkinkan sekolah/madrasah di daerah non-3T untuk beralih ke kurikulum baru dalam waktu dua tahun (tiga tahun untuk sekolah/madrasah di daerah 3T) setelah peluncuran. Kurikulum Merdeka menekankan pada penciptaan suasana belajar yang menyenangkan di sekolah bagi siswa dan guru.

³⁹ Kemendikbudristek (2024). Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran (Merdeka Curriculum for Improved Learning Quality). <https://www.youtube.com/live/K0AljvVoaE>

mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menerapkan praktik pedagogis inovatif seperti pembelajaran terdiferensiasi (*differentiated instruction*), pembelajaran berbasis proyek, dan interaksi yang lebih intens dengan siswa. Sebagai bagian dari instruksi yang berbeda, guru juga diajarkan untuk melakukan asesmen berkelanjutan di kelas.

Lebih lanjut, sejak 2021, Indonesia telah menginisiasi Asesmen Nasional (AN) untuk menilai kualitas pendidikan secara tahunan di seluruh sekolah.⁴⁰ Selain mengukur keterampilan literasi dan numerasi, AN juga menilai karakter siswa serta berbagai aspek lingkungan belajar. Selain AN, Kemenag juga melaksanakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI),⁴¹ yang mengukur pembelajaran di madrasah dalam bidang literasi, numerasi, sains, dan geografi. Hasil AN, yang disampaikan melalui Rapor Pendidikan, berfungsi sebagai analisis awal bagi sekolah/madrasah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk merencanakan serta meningkatkan kualitas pendidikan.⁴²

Membuat pemangku kepentingan pendidikan bertanggung jawab atas pembelajaran siswa. Perubahan ketiga memperkenalkan akuntabilitas yang lebih besar. Di tingkat nasional, hasil belajar kini telah diperkenalkan sebagai indikator kinerja, yang berarti bahwa pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta sekolah akan bertanggung jawab atas hasil literasi dan numerasi dasar. Di tingkat daerah, peningkatan akuntabilitas—misalnya melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM/MSS)—juga telah mempengaruhi akreditasi sekolah, yang kini akan mencakup hasil belajar siswa. Akhirnya, pimpinan sekolah memiliki keterlibatan yang jauh lebih besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Program Guru Penggerak (PGP) Kemendikbudristek bertujuan melatih guru dalam bidang pedagogi dan kepemimpinan pembelajaran, serta pada dasarnya membentuk komunitas pembelajaran, yang suatu hari dapat membuka peluang bagi guru-guru tersebut untuk menjadi kepala sekolah atau pemimpin pendidikan. Hal ini akan menggeser peran kepala sekolah agar lebih terlibat dalam proses pedagogis dan mengurangi peran administratif. Melalui program ini, Kemendikbudristek telah melatih lebih dari 50.000 guru (dari target 100.000 guru pada akhir 2024) untuk menjadi kepala sekolah.

Sejak 2024, Kemendikbudristek telah memperkenalkan konsep Sekolah yang Kita Cita-Citakan. Konsep ini merupakan upaya kolaboratif untuk mendorong semua pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, bersama-sama memperkuat ekosistem sekolah. Tujuannya adalah membangun karakter siswa (Profil Pelajar Pancasila)⁴³ dan kompetensi (literasi, numerasi). Konsep “sekolah yang kita cita-citakan” ini terfokus pada empat komponen inti, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengajaran yang reflektif dan

⁴⁰ Kemendikbudristek (2024). Asesmen Nasional. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/asesmen-nasional>

⁴¹ Kemenag (2024). Tentang AKMI. <https://portal-akmi.kemenag.go.id/#about>

⁴² Kemendikbudristek (2024). Rapor Pendidikan. <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>

⁴³ Terdiri dari: Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, keberagaman global, kemandirian, berpikir kritis, kreativitas, dan gotong royong.

kolaboratif, kepemimpinan yang berkelanjutan, serta lingkungan belajar yang inklusif dan aman.⁴⁴

Respon: KREASI

Meski reformasi pendidikan sedang berlangsung untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemendikbudristek dan Kemenag masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Lembaga donor dan mitra pembangunan memiliki peluang untuk menghadirkan manfaat dengan turut berkontribusi dalam reformasi pendidikan yang sudah terbukti menghasilkan dampak positif terhadap hasil belajar. Pada tahun 2022, Global Partnership for Education (GPE) mengumumkan Indonesia sebagai negara mitra baru, yang membuka peluang untuk mengembangkan Partnership Compact (PC), atau dokumen kerja sama, serta dua mekanisme pembiayaan terkait: System Capacity Grant (SCG) dan Multiplier Grant (MG). Indonesia memilih lembaga koordinator bersama, yaitu UNICEF sebagai institusi multilateral dan PSPK, sebuah organisasi non-pemerintah di bidang pendidikan nasional, untuk memimpin sebagai lembaga koordinator dari tahun 2021–2023. Ko-ketua Mitra Pendidikan Indonesia/Local Education Group (MPI/LEG), yaitu Kemendikbudristek dan Kemenag, menugaskan UNICEF – dengan dukungan dari MPI/LEG – untuk memimpin pengembangan PC. Sejalan dengan RPJMN 2020–2024, Renstra,⁴⁵ dan reformasi pendidikan Merdeka Belajar, serta setelah dilakukan *Enabling Factors Analysis* (Analisis Faktor Pendukung), PC pun dikembangkan.

PC merupakan reformasi pendidikan yang diprioritaskan berdasarkan peningkatan kualitas pendidikan, baik dalam praktik maupun kebijakan di tingkat sekolah, daerah, dan nasional. PC dikembangkan dengan penyesuaian antara reformasi Merdeka Belajar dan Renstra melalui konsultasi ekstensif dengan Kemendikbudristek, Kemenag, dan MPI/LEG. Dengan menitikberatkan pada praktik pendidikan, PC akan mendukung guru dan pemimpin sekolah untuk menerapkan praktik yang berorientasi pada siswa sehingga menghasilkan capaian keterampilan dasar dan pengembangan karakter bagi seluruh siswa sekolah dasar dan menengah, termasuk bagi kelompok yang kurang beruntung (misalnya karena kebutuhan individual seperti anak penyandang disabilitas, hambatan sosial, dan isu kemiskinan). Peningkatan tata kelola pendidikan akan melibatkan penguatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan di tingkat daerah dan nasional dalam melaksanakan kebijakan, sistem, dan layanan pendidikan yang berkualitas untuk perolehan keterampilan dasar dan pengembangan karakter bagi seluruh siswa sekolah dasar dan menengah, termasuk kelompok yang kurang beruntung. Empat hasil antara kunci yang diharapkan adalah:

1. Peningkatan praktik guru serta kepemimpinan instruksional dan manajemen perubahan, melalui pemanfaatan studi mandiri, pelatihan langsung, serta pembelajaran kolaboratif dan refleksi bersama guru lain secara lebih efektif;

⁴⁴ Kemendikbudristek (2024). Sekolah yang kita cita-citakan.

<https://guru.kemdikbud.go.id/dokumen/nxo92w0Eem?parentCategory=Pengelolaan%20Satuan%20Pendidikan>

⁴⁵ Renstra Kemendikbudristek 2022-2024 (<https://bit.ly/3YwhGs8>); Renstra Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag 2020-2024 (https://drive.google.com/file/d/1necnHkkbzezuC-ajTENTEN2PL_Z0BHni/view)

2. Sekolah dan madrasah memiliki lingkungan belajar yang aman, inklusif, sehat, tahan terhadap dampak iklim, mendukung, dan bermakna, termasuk melalui penguatan dukungan masyarakat;
3. Peningkatan kebijakan dan praktik agar anak-anak serta remaja dari kelompok yang kurang beruntung memperoleh kesempatan belajar; dan
4. Peningkatan tata kelola ekosistem pendidikan nasional dan lokal, dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lain di masyarakat, untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas.

Reformasi pendidikan yang diprioritaskan ini menjadi dasar bagi pembiayaan GPE melalui SCG dan MG. MPI/LEG memilih UNICEF sebagai agen hibah untuk mendukung pengembangan SCG. SCG mencerminkan PC dan memiliki empat fokus utama: (1) Peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah; (2) Peningkatan lingkungan belajar; (3) Peningkatan kebijakan dan praktik untuk kelompok yang kurang beruntung; dan (4) Peningkatan tata kelola serta koordinasi ekosistem pendidikan nasional dan lokal untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pada September 2023, GPE dan MPI/LEG menyetujui serta mengesahkan *Expression of Interest* senilai USD 24,27 juta dari Multiplier Grant (MG) dengan memanfaatkan pendanaan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Fase 3 dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia yang senilai USD 72,81 juta (2024–2031). Program yang didanai GPE Multiplier Grant, yang selanjutnya dikenal sebagai **Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI)** mencerminkan semangat Merdeka Belajar tentang pembelajaran yang merdeka serta pendekatan inovatif dari INOVASI. Sejak Januari 2024, Save the Children telah memimpin proses konsultasi yang ekstensif dengan pihak pemerintah (di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), lembaga koordinator, INOVASI, dan MPI/LEG untuk mengembangkan Konsep Awal (*Program Outline*) dan draf Program KREASI (lihat Lampiran A: Daftar Konsultasi untuk KREASI). Pada Mei 2024, *Co-Coordinating Agents* mengajukan *Program Outline* Program KREASI kepada GPE. Umpan balik gabungan GPE untuk PC dan KREASI bulan Juni 2024 telah dimasukkan ke dalam dokumen draf program ini.

Sejak awal, KREASI mengadopsi pendekatan yang dipimpin oleh pihak lokal di antara pemangku kepentingan pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan serta merumuskan strategi yang paling relevan untuk mencapai perubahan transformasional dalam meningkatkan hasil belajar dasar yang merata dan inklusif dalam lingkungan belajar yang aman. Dimulai pada April 2024, Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSPK), sebagai Konsultan Nasional, dengan dukungan dari Save the Children, memimpin asesmen diagnostik komprehensif yang mencakup kunjungan lapangan secara langsung dan virtual ke empat provinsi dan delapan kabupaten/kota yang ditargetkan berdasarkan kriteria seleksi yang ditetapkan oleh Ko-Ketua dan anggota MPI/LEG. Tujuan kunjungan lapangan tersebut adalah untuk mengeksplorasi praktik dan kebijakan saat ini dalam mendukung keterampilan dasar siswa sekolah dasar di antara mitra ekosistem di tingkat kabupaten/kota, serta mengontekstualisasikan aktivitas dan keluaran program untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan identifikasi mandiri tantangan pendidikan di daerah masing-masing dan solusi yang diharapkan atas tantangan tersebut. Studi ini

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan lensa *appreciative inquiry*⁴⁶ dan mengumpulkan data melalui lokakarya pemangku kepentingan, observasi sekolah, wawancara, serta tinjauan dokumen kebijakan dan praktik pendidikan nasional dan lokal. Lokakarya pertama bertujuan untuk mengumpulkan kondisi pendidikan saat ini berdasarkan parameter program yang diusulkan, termasuk strategi yang sudah diterapkan dalam mendukung pembelajaran dasar (kurikulum dan asesmen, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, dan perlindungan anak dengan isu lintas sektor terkait GEDSI dan perubahan iklim), mengidentifikasi capaian, serta menggali aspirasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lokakarya tersebut mulai memberdayakan pemangku kepentingan pendidikan untuk terus berperan sebagai agen perubahan dalam Merdeka Belajar. Lokakarya kedua melanjutkan pembelajaran dari lokakarya pertama dan mulai mengidentifikasi intervensi yang relevan untuk mencapai hasil tersebut. Lokakarya ini berperan dalam memperkuat komitmen dan partisipasi pemangku kepentingan ke depan. Untuk laporan lengkap, lihat: Lampiran B Analisis Situasi tentang Keterampilan Dasar, GEDSI, Perubahan Iklim, dan Perlindungan Anak di Sektor Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

KREASI sejalan dengan PC Indonesia yang baru-baru ini disetujui (dengan penyesuaian langsung yang tercermin dalam teori perubahan secara keseluruhan, serta teori perubahan masing-masing komponen), serta dengan RPJMN 2020–2024, Renstra Kemendikbudristek dan Kemenag, dan Merdeka Belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa serta konsep Sekolah yang Kita Cita-Citakan. Oleh karena itu, KREASI diharapkan dapat berkontribusi terhadap perubahan sistemik dan transformasional, mengingat kesesuaiannya yang erat dengan Merdeka Belajar. Memenuhi persyaratan Multiplier, KREASI juga sejalan dengan program INOVASI Fase 3, yaitu pelaksanaan tujuan INOVASI yang berkaitan dengan kurikulum dan asesmen, praktik pengajaran, serta kepemimpinan pendidikan, pengenalan perlindungan anak, dan terus mengintegrasikan isu lintas sektor seperti kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta perubahan iklim, adaptasi, dan strategi mitigasi perubahan iklim (lihat Tabel 2). Sejalan dengan cakupan INOVASI, KREASI akan bekerja pada jenjang awal sekolah dasar (kelas 1–3) dan memperluasnya ke tingkat pra-sekolah (TK B) untuk mendukung keterampilan dasar anak sebelum memasuki sekolah dasar.

⁴⁶ *Appreciative Inquiry* menggunakan pendekatan deviasi positif terhadap pengembangan institusi dengan berfokus pada pengakuan, apresiasi, dan pembangunan kekuatan yang sudah ada dalam suatu organisasi dan mengidentifikasi jalan ke depan untuk perbaikan.

Tabel 2: Tambah Program KREASI

Teori Perubahan		Program (Donor)	
Tujuan	Hasil	KREASI (GPE)	INOVASI Fase 3 (DFAT)
Peningkatan pembelajaran dan pencapaian keterampilan dasar bagi seluruh siswa prasekolah dan sekolah dasar di Indonesia	Hasil 1: Kurikulum dan Penilaian Peningkatan kebijakan dan praktik untuk kurikulum prasekolah dan sekolah dasar yang adil, materi pembelajaran, dan asesmen untuk keterampilan dasar di tingkat nasional dan daerah	Ya	Ya (lanjutan dari INOVASI Fase 2)
	Hasil 2: Praktik Pengajaran Peningkatan kebijakan dan praktik untuk pengajaran keterampilan dasar yang adil di kabupaten sasaran	Ya	Ya (lanjutan dari INOVASI Fase 2)
	Hasil 3: Kepemimpinan Pendidikan Peningkatan kebijakan dan praktik untuk kepemimpinan pengajaran dan pembelajaran yang adil dan efektif di kabupaten sasaran	Ya	Ya
	Hasil 4: Perlindungan Anak Peningkatan kebijakan dan praktik untuk perlindungan anak yang adil dan pencegahan bahaya di kabupaten sasaran	Ya	Tidak (tetapi banyak elemen perlindungan anak yang dimasukkan dalam hasil GEDSI INOVASI)
	Lintas Sektor: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)	Ya, GEDSI bersifat lintas sektor dan akan tertanam dalam keempat Hasil KREASI	Ya (akan lebih fokus pada GEDSI di Fase 3)
Lintas Sektor: Perubahan Iklim	Ya, Perubahan Iklim bersifat lintas sektor dan akan tertanam dalam keempat Hasil KREASI	Ya (hasil baru)	

Penargetan

Penentuan wilayah target provinsi dan kabupaten/kota untuk KREASI didasarkan pada konsultasi ekstensif dan pertimbangan strategis guna memastikan dampak dan pemerataan yang maksimal. Dasar pemilihan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

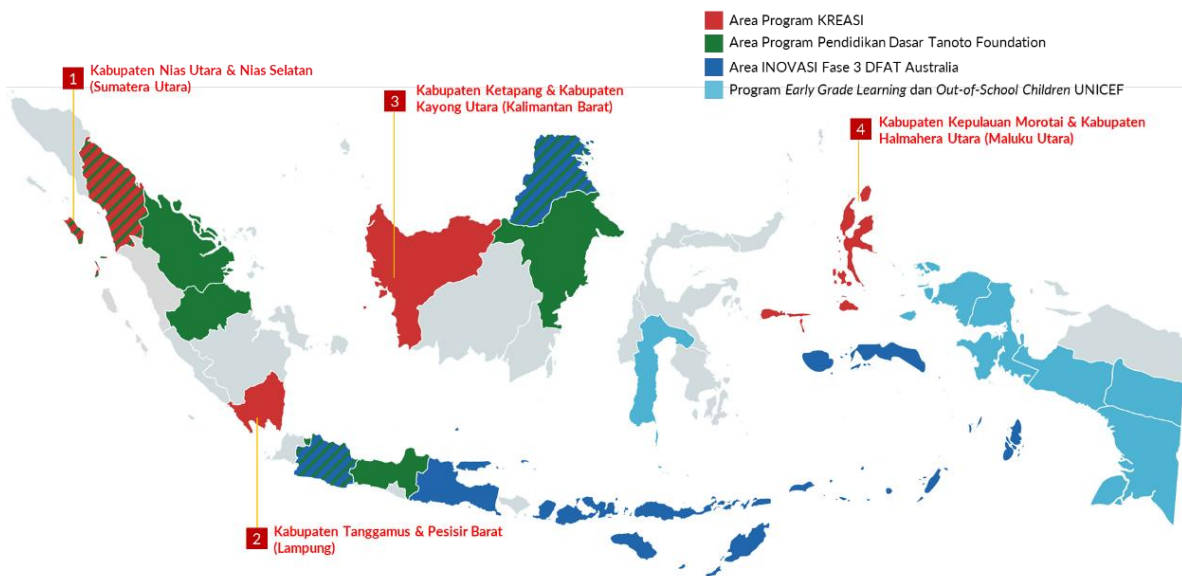
1. Save the Children, sebagai Agen Hibah, telah melakukan beberapa konsultasi dengan DFAT serta Tanoto Foundation (TF). Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa KREASI harus fokus pada wilayah yang belum tercakup oleh program Pendidikan Dasar yang ada, termasuk program UNICEF.
2. BAPPENAS dan Kemendikbudristek merekomendasikan agar program ini mencakup wilayah di bagian barat Indonesia (misalnya Sumatera) serta pulau-pulau terpencil dan kecil untuk mengatasi disparitas geografis dalam akses dan kualitas pendidikan.
3. Agen Hibah juga mengusulkan wilayah di mana kehadirannya sudah kuat dan telah menjalin keterlibatan dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah. Pemilihan strategis ini bertujuan meningkatkan kemungkinan keberhasilan program dengan memanfaatkan hubungan yang telah terjalin.
4. Setelah konsultasi lebih lanjut dengan anggota MPI/LEG, disepakati bahwa program ini harus mencakup lebih banyak madrasah untuk menyeimbangkan dampak antara sekolah di bawah Kemendikbudristek dan yang di bawah Kemenag.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dipilih empat provinsi: Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Penentuan kabupaten/kota di dalam provinsi-provinsi tersebut didasarkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata tahun sekolah, dan tingkat literasi, serta pertimbangan operasional seperti konektivitas dan infrastruktur. Akibatnya, dipilih delapan kabupaten/kota, yaitu:

1. Nias Utara dan
2. Nias Selatan (Provinsi Sumatera Utara);
3. Tanggamus dan
4. Pesisir Barat (Provinsi Lampung);
5. Ketapang dan
6. Kayong Utara (Provinsi Kalimantan Barat); serta
7. Halmahera Utara dan
8. Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara).

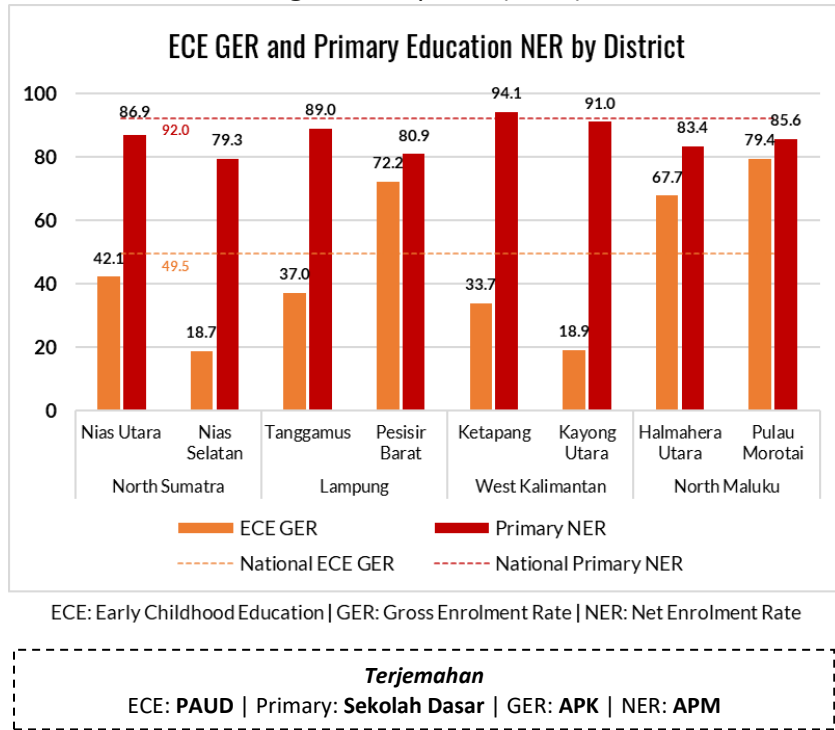
Delapan kabupaten/kota yang terpilih mencakup beragam wilayah, termasuk daerah pedesaan, perkotaan, dan pulau kecil, yang mewakili rentang geografis dari barat hingga timur Indonesia. Dari delapan kabupaten/kota tersebut, tiga tergolong sebagai kabupaten/kota 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) berdasarkan Perpres No. 63/2020.

Gambar 2: Provinsi dan Kabupaten Target

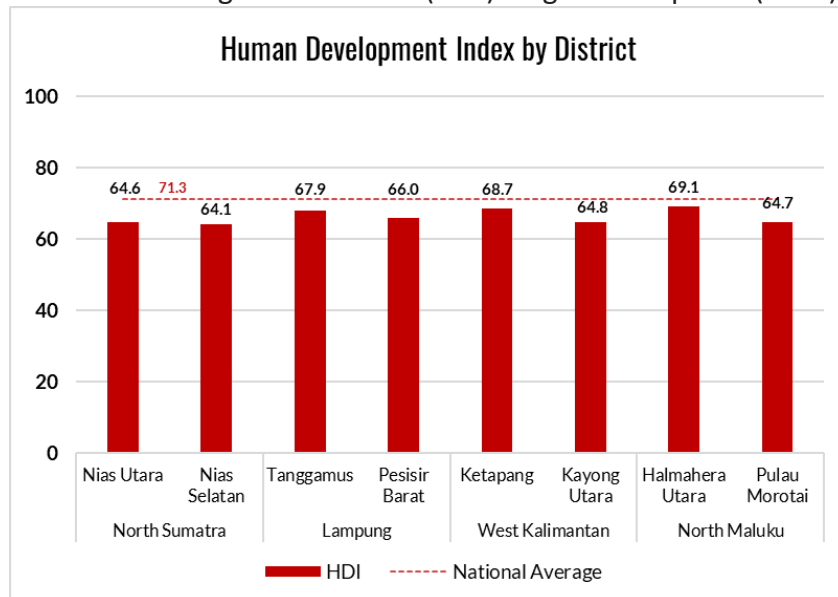


Data akses pendidikan dasar dan Indeks Pembangunan Manusia dari delapan kabupaten/kota yang terpilih disajikan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 secara berturut-turut.

Gambar 3: Data Akses Pendidikan Tingkat Kabupaten (2023)⁴⁷



Gambar 4: Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kabupaten (2023)⁴⁸



⁴⁷ Kemendikbudristek (2024). Sistem Informasi APK-AKM.

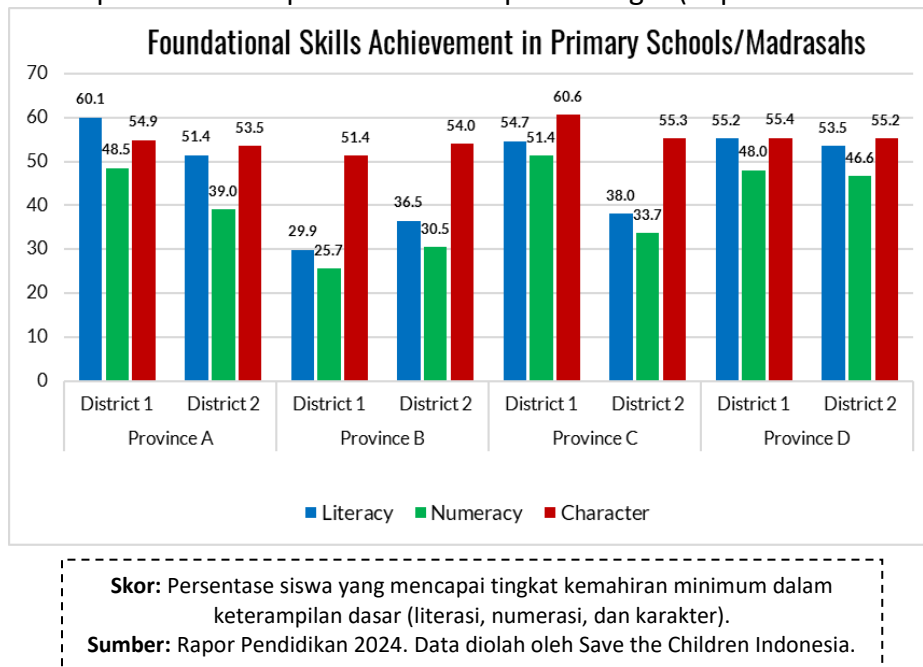
https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkpmsekolahmadrasah?kode_wilayah=000000&tahun=2023
Data diolah oleh Save the Children Indonesia.

⁴⁸ BPS (2023). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia, 2022-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEzIzI=-/metode-baru--indeks-pembangunan-manusia.html>

Kriteria Seleksi Sekolah

1. Setelah memetakan seluruh 2.847 sekolah/madrasah pra-sekolah dan sekolah dasar di kabupaten/kota sasaran, seleksi dilakukan berdasarkan kriteria geografis (keseimbangan antara sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan yang berjarak lebih dari tiga jam dari pusat kota) dan sekolah yang memiliki keterampilan dasar rendah (berdasarkan Rapor Pendidikan). Selain itu, penargetan juga mencakup sekolah yang belum mengadopsi Kurikulum Merdeka. Pendekatan yang fleksibel juga digunakan untuk mempertimbangkan potensi skala perluasan dari sekolah percontohan.
2. Pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi mengenai prioritas penargetan sekolah berdasarkan lokasi geografis, data hasil belajar sebagaimana tercermin dalam Rapor Pendidikan, serta komitmen kepala sekolah. Semua sekolah yang menjadi target KREASI dari Kemendikbudristek dan Kemenag, termasuk sekolah pra-sekolah, adalah sekolah negeri atau sekolah yang diatur sebagai non-profit sesuai dengan pedoman GPE.

Gambar 5: Data Capaian Keterampilan Dasar Kabupaten Target (Rapor Pendidikan 2024)⁴⁹



Berdasarkan Gambar 5, terdapat variasi signifikan dalam pencapaian keterampilan dasar di berbagai kabupaten/kota dan provinsi. Skor literasi cenderung lebih tinggi dibandingkan skor numerasi di sebagian besar kabupaten/kota. Tidak ada pola yang konsisten dalam keterampilan karakter, karena beberapa kabupaten/kota menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan yang

⁴⁹ Karena sensitivitas data dan mengikuti rekomendasi dari Kemendikbudristek, nama-nama kabupaten telah dianonimkan dan urutannya telah diacak untuk mencegah identifikasi dari grafik sebelumnya. Skor diambil dari data Rapor Pendidikan 2024 dan digabungkan menggunakan rumus berikut untuk menghitung skor rata-rata untuk sekolah Kemendikbudristek dan Kemenag $\bar{x}^c = ((\bar{x}^1 \cdot n_1) + (\bar{x}^2 \cdot n_2)) / (n_1 + n_2)$; di mana \bar{x}^c adalah rata-rata gabungan; \bar{x}^1 adalah skor rata-rata untuk sekolah MoECRT; \bar{x}^2 adalah skor rata-rata untuk sekolah MoRA; n_1 adalah jumlah sekolah MoECRT; dan n_2 adalah jumlah sekolah MoRA. Data diolah oleh Save the Children Indonesia.

lain dengan cara yang tidak terduga. Data ini menyoroti perlunya intervensi yang ditargetkan di kabupaten/kota tertentu untuk meningkatkan keterampilan dasar, terutama numerasi, yang umumnya menunjukkan tingkat kemahiran yang lebih rendah.

Terkait dengan lingkungan belajar (Tabel 3), aspek seperti Inklusivitas dan Kepemimpinan Instruksional memerlukan upaya yang lebih terfokus untuk meningkatkan standar pendidikan. Meskipun aspek seperti Keamanan dan Kebhinekaan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dimensi lainnya, hal ini tidak berarti bahwa semua permasalahan di bidang tersebut telah sepenuhnya terselesaikan. Wawasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam dokumen ini dan dalam Lampiran B.

Tabel 3: Data Survei Lingkungan Belajar di Kabupaten Target (Rapor Pendidikan 2024)⁵⁰

Province	District	Teaching Quality	Instructional Leadership	Safety	Gender Equality	Diversity	Inclusivity
Province A	District 1	60.5	53.8	68.0	67.6	70.6	52.0
	District 2	58.9	52.7	67.4	67.9	69.1	51.2
Province B	District 1	59.5	56.7	62.9	65.8	68.0	49.0
	District 2	64.4	57.4	69.4	66.6	69.4	53.3
Province C	District 1	67.9	61.5	74.4	69.7	74.8	57.8
	District 2	63.5	53.6	66.6	65.5	68.5	51.0
Province D	District 1	62.6	55.3	70.2	67.6	69.9	52.9
	District 2	60.7	53.3	68.1	66.1	67.8	52.4

Lowest  Highest

Terjemahan

Province: **Provinsi** | District: **Kabupaten** | Teaching Quality: **Kualitas Pembelajaran** | Instructional Leadership: **Kepemimpinan Instruksional** | Safety: **Iklim Keamanan Sekolah** | Gender Equality: **Iklim Kesetaraan Gender** | Diversity: **Iklim Kebhinekaan** | Inclusivity: **Iklim Inklusivitas** | Lowest: **Terendah** | Highest: **Tertinggi**

Catatan

Kualitas Pengajaran: Ini mencakup kompetensi guru dalam (a) manajemen kelas, (b) dukungan psikologis bagi siswa, dan (c) metode pengajaran. **Kepemimpinan Instruksional:** Ini mencakup kompetensi kepala sekolah dalam (a) mengomunikasikan dan mengimplementasikan visi dan misi sekolah terkait peningkatan pembelajaran, (b) pengembangan dan manajemen kurikulum, serta (c) penyediaan program, sistem insentif, dan sumber daya yang mendukung refleksi serta pembelajaran bagi guru. **Keamanan:** Ini mencakup kesejahteraan psikologis, prevalensi perundungan, kekerasan seksual, dan isu-isu terkait lainnya. **Kesetaraan Gender:** Ini mencakup pemahaman dan perilaku sekolah dalam mendukung serta menjamin hak laki-laki dan perempuan secara setara. **Keberagaman:** Ini mencerminkan toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama. **Inklusivitas:** Ini mencerminkan sikap terhadap serta penyediaan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Total penerima manfaat KREASI disajikan dalam Tabel 4.

⁵⁰ Ibid.

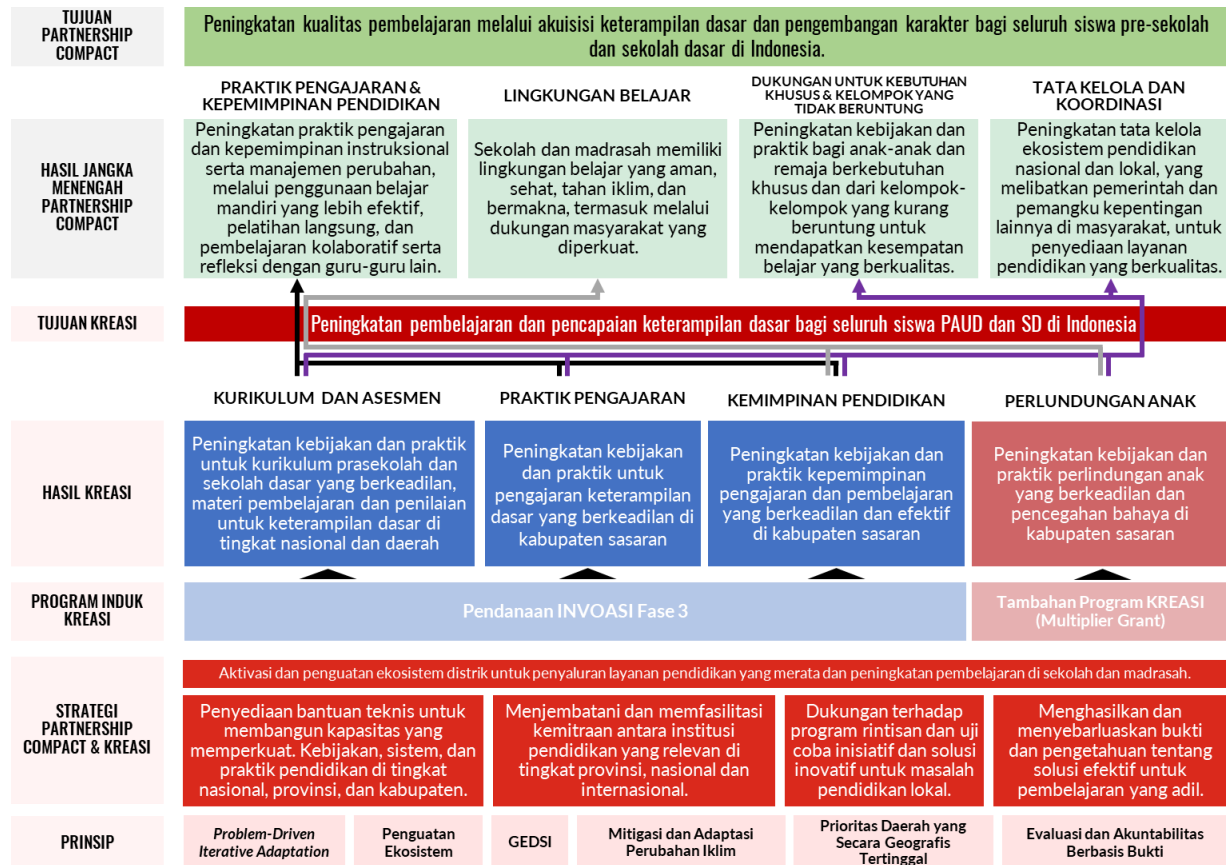
Tabel 4: Total Penerima Manfaat

Penerima Manfaat	Total	Disagregasi	
Siswa	50,000	Gender	25.000 anak laki-laki dan 25.000 anak perempuan (50:50); Setidaknya 1% dari total siswa adalah penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus;
Guru	4,000	Gender	1.200 laki-laki dan 2.800 perempuan (30:70);
Kepala sekolah	560	Gender	224 laki-laki dan 336 perempuan (40:60);
Sekolah	560	Sub-sektor	460 sekolah dasar dan 100 sekolah pra-sekolah (470 sekolah di bawah Kemendikbudristek dan 90 sekolah di bawah Kemenag) 470 sekolah di bawah Kemendikbudristek: <ul style="list-style-type: none"> • 390 sekolah dasar (94% negeri: 6% swasta)⁵¹ • 80 sekolah pra-sekolah (22% negeri: 78% swasta) 90 sekolah di bawah Kemenag: <ul style="list-style-type: none"> • 70 sekolah dasar (17% negeri: 83% swasta) • 20 sekolah pra-sekolah (100% swasta)

⁵¹ swasta berarti sekolah swasta nirlaba berbiaya rendah

Desain Program

Gambar 6: Teori Perubahan



KREASI bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pencapaian keterampilan dasar bagi semua siswa pra-sekolah dan sekolah dasar di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, KREASI akan memperbaiki kebijakan dan praktik dalam bidang kurikulum dan asesmen, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, serta perlindungan anak dengan memberdayakan mitra lokal. Semua area hasil program akan mengintegrasikan isu lintas sektor, seperti gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta perubahan iklim.

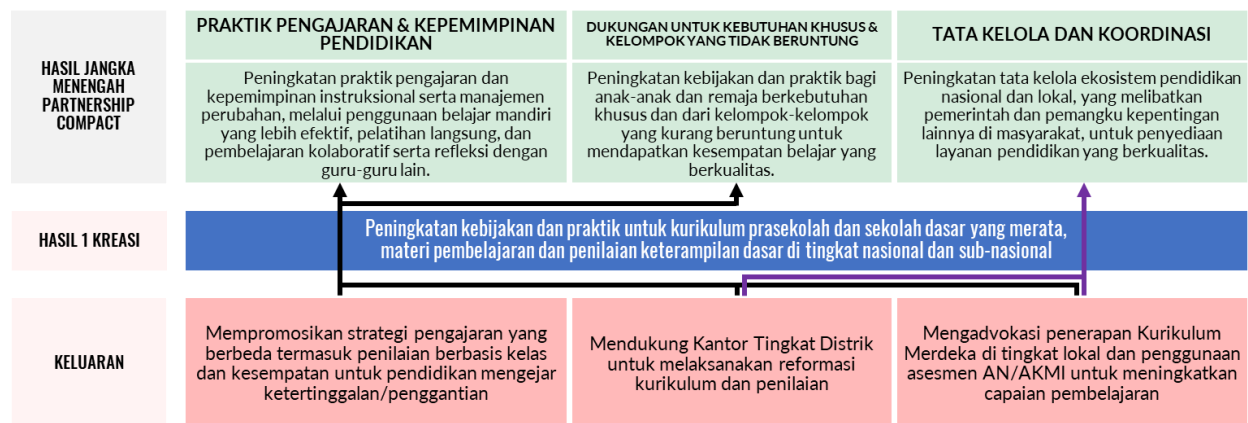
Kegiatan program ini didasarkan pada permasalahan yang teridentifikasi di lapangan melalui berbagai konsultasi dan lokakarya bersama pemangku kepentingan lokal—termasuk pejabat pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan asosiasi mereka—yang secara langsung menentukan permasalahan yang mereka hadapi. KREASI selaras dengan reformasi pendidikan Merdeka Belajar yang telah berjalan, sehingga mendukung Kemendikbudristek dan Kemenag serta mendorong perubahan pendidikan yang bersifat sistemik dan transformasional dalam keterampilan dasar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KREASI akan berkontribusi langsung pada capaian **Partnership Compact** serta selaras dengan **INOVASI**, sehingga memberikan peluang besar untuk menciptakan dampak berbasis bukti.

Strategi utama dalam proses ini mencakup pengaktifan dan penguatan ekosistem pendidikan di tingkat kabupaten, pemberian dukungan teknis untuk membangun kapasitas, menjembatani dan memfasilitasi kemitraan, mendukung program uji coba dan penerapan solusi inovatif, serta menghasilkan dan menyebarkan bukti serta pengetahuan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan.

Teori perubahan KREASI secara keseluruhan disajikan dalam **Gambar 6**, sementara teori perubahan masing-masing komponen disajikan dalam setiap deskripsi komponen. Setiap komponen memiliki hasil utama yang disertai dengan keluaran programatik (baik dalam bentuk program maupun kebijakan) serta aktivitas spesifik untuk setiap keluaran.

Tujuan Program

Hasil 1: Kurikulum dan Asesmen



Bagian **Kerangka Kebijakan Pendidikan** sebelumnya telah memaparkan kebijakan reformasi pendidikan Kemendikbudristek dan Kemenag terkait kurikulum dan asesmen. Kemendikbudristek memperkenalkan **Kurikulum Merdeka (KM)** pada tahun 2022 yang kemudian disahkan melalui **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) No. 12/2024**, yang mewajibkan seluruh sekolah menerapkan KM paling lambat pada tahun 2028. KM merupakan Kurikulum Nasional yang mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sekolah menggunakan KM sebagai kurikulum berbasis sekolah yang bertujuan membangun keterampilan dasar dengan menyesuaikan dan mengontekstualisasikan pengajaran sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.⁵²

Sebelum KM diterapkan, kurikulum sebelumnya memiliki kerangka yang lebih kaku. Meskipun kini terdapat fleksibilitas serta otonomi yang lebih besar, pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di tingkat daerah yang terdesentralisasi, masih dalam tahap penyesuaian dengan

⁵² Kemendikbudristek (2023). Permendikbud No. 12/2024 on Kurikulum Merdeka

pendekatan baru ini.⁵³ Temuan awal dari kunjungan lapangan menunjukkan bahwa meskipun kepala sekolah dan guru memiliki pemahaman teoretis mengenai **pembelajaran terdiferensiasi**, dalam praktiknya mereka masih menggunakan metode pengajaran konvensional dan buku teks yang berfokus pada standar kemampuan rata-rata siswa dalam kelas. Banyak guru melakukan asesmen berbasis kelas secara berkelanjutan untuk memahami kompetensi dan gaya belajar siswa (termasuk siswa yang tertinggal yang membutuhkan dukungan tambahan dari guru atau teman sebaya), tetapi hasil asesmen tersebut tidak dimanfaatkan untuk menyesuaikan kurikulum lokal, rencana pembelajaran, dan praktik pengajaran.⁵⁴

Selain itu, beberapa guru sekolah dasar tidak sepenuhnya menyadari pentingnya memprioritaskan keterampilan dasar dalam literasi dan numerasi, sementara sebagian lainnya justru menjadikan keterampilan dasar ini sebagai syarat masuk sekolah dasar.⁵⁵ Transisi dari pendidikan anak usia dini (**TK/RA**) ke sekolah dasar (**SD/MI**) sering kali diiringi ekspektasi bahwa anak-anak seharusnya sudah menguasai keterampilan dasar **calistung** (membaca, menulis, dan berhitung). Ekspektasi ini didukung oleh orang tua anak usia dini serta kepala sekolah dan guru sekolah dasar, yang pada akhirnya menciptakan hambatan besar bagi anak-anak usia dini untuk memasuki sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran di kalangan kepala sekolah, guru, dan orang tua mengenai tujuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar awal yang lebih berorientasi pada **pembelajaran yang menyenangkan** dan kesiapan sekolah sebagai prasyarat bagi penguasaan literasi dan numerasi dasar. KM telah mencakup kompetensi pendidikan anak usia dini, yaitu enam keterampilan dasar yang berlandaskan pada aspek perkembangan yang dibutuhkan oleh anak usia dini untuk berkembang dan mempersiapkan diri ke jenjang pendidikan dasar. Keterampilan dasar tersebut meliputi: (1) Pendidikan karakter, (2) Kematangan emosional, (3) Keterampilan sosial dan bahasa, (4) Keterampilan motorik, (5) Sikap positif terhadap pembelajaran, dan (6) Keterampilan kognitif yang mencakup kesiapan literasi dan numerasi.⁵⁶

Beberapa guru menyatakan bahwa mereka membutuhkan akses terhadap sumber daya pengajaran dan pembelajaran, tetapi masih belum memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti **Platform Merdeka Mengajar (PMM)** (dengan alasan keterbatasan teknologi meskipun penggunaan ponsel cukup luas) dan kelompok kerja guru. Ada upaya untuk meningkatkan literasi melalui solusi yang lebih mudah diterapkan, seperti menyediakan lebih banyak materi belajar, menciptakan lingkungan yang kaya bahan bacaan, dan mengadakan sudut baca di kelas.⁵⁷

Terkait pendidikan karakter, beberapa guru mengamati bahwa upaya dalam menanamkan nilai kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi di antara siswa sering kali dilakukan dalam acara-acara

⁵³ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Kemendikbudristek (2024). Transisi PAUD SD <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/transisipauds/>

⁵⁷ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

sekolah seperti perpisahan atau perayaan keagamaan.⁵⁸ Namun, upaya ini tidak memiliki strategi yang terstruktur serta belum memiliki keterkaitan yang jelas dengan **Profil Pelajar Pancasila**, yang menjadi acuan pendidikan karakter dan diukur melalui **Survei Karakter dalam Asesmen Nasional (AN)**. Ketidaksihesuaian ini menunjukkan perlunya integrasi pendidikan karakter yang lebih sistematis dalam kurikulum.

Terdapat kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan prinsip **GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)** dalam kurikulum dan praktik asesmen di sekolah dan madrasah. Kemendikbudristek dan Kemenag, dengan dukungan INOVASI, telah mengembangkan **Profil Belajar Siswa (PBS)** sebagai alat bagi sekolah/madrasah untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus serta bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kebijakan layanan pendidikan inklusif.^{59&60} Namun, di beberapa sekolah, guru masih kekurangan keterampilan dalam melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi anak penyandang disabilitas.

Selain itu, karena bahasa pengantar dan materi pembelajaran hanya tersedia dalam **Bahasa Indonesia**, anak-anak yang bahasa ibunya bukan Bahasa Indonesia—terutama di daerah pedesaan dan terpencil—membutuhkan dukungan tambahan. Hal ini sangat penting karena anak-anak tersebut sering kali menghadapi hambatan besar dalam pendidikan mereka sejak awal sekolah.⁶¹

Di sisi lain, meskipun beberapa guru dan sekolah telah memasukkan isu **perubahan iklim** ke dalam kurikulum lokal mereka atau melalui inisiatif seperti proyek pengelolaan sampah dan penanaman pohon, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pendidikan perubahan iklim yang lebih komprehensif di Indonesia. Kemendikbudristek telah mengidentifikasi **Gaya Hidup Berkelanjutan** sebagai bagian dari **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)**, tetapi semangat dari fokus ini masih kurang berkembang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerja sama dengan Kemendikbudristek, telah mengembangkan program **Sekolah Adiwiyata** yang bertujuan meningkatkan aksi mitigasi perubahan iklim. Namun, saat ini, penerapan perubahan iklim dalam pendidikan masih terbatas pada infrastruktur ramah lingkungan di sekolah dan bentuk pendidikan lingkungan yang masih terbatas. Masih banyak yang bisa dilakukan, dan meskipun sumber daya serta modul sudah tersedia di PMM, mayoritas guru tidak mengetahui keberadaannya dan belum mengaksesnya.

⁵⁸ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

⁵⁹ Kemendikbudristek (2021). Profil Belajar Siswa (Student Learning Profile). <https://gtkdikmendikus.kemdikbud.go.id/profil-belajar-siswa/>

⁶⁰ Kemendikbudristek (2023). Ministerial Regulation No. 48/2023 on Appropriate Accommodations for Learners with Disabilities in Formal Early Childhood Education Units, Basic Education, Secondary Education, and Higher Education Institutions. https://jdih.kemdikbud.go.id/sidih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20230818_112509_PERMEN%2048%20TAHUN%202023_AYL.pdf

⁶¹ INOVASI (2019). Use of Regional Languages to Transition to Bahasa Indonesia. <https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2022/02/Policy-Brief-2-Mother-Language-2011-2019.pdf>

Terakhir, kunjungan lapangan diagnostik di berbagai kabupaten/kota yang diamati menunjukkan bahwa beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki regulasi terkait penyelenggaraan layanan pendidikan dasar, tetapi mereka belum memperbarui atau mengembangkan regulasi lebih lanjut yang berkaitan dengan reformasi **Merdeka Belajar (MB)** di bidang kurikulum dan asesmen.⁶²

Untuk berkontribusi dalam perubahan sistemik, **KREASI akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan reformasi KM dan asesmen pendidikan.**

Keluaran 1.1: Mempromosikan strategi pembelajaran terdiferensiasi, termasuk asesmen berbasis kelas dan peluang untuk pendidikan remedial/mengejar ketertinggalan (praktik)

Sebagai bagian dari reformasi pendidikan **Merdeka Belajar (MB)**, Indonesia tengah menjalankan serangkaian reformasi kurikulum dan asesmen sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian **Kerangka Kebijakan Pendidikan**. Reformasi ini mendorong **pembelajaran terdiferensiasi**, yang memungkinkan guru menggunakan berbagai metodologi pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan serta gaya belajar siswa guna memenuhi kebutuhan individu peserta didik.⁶³

Pendekatan **Teaching at the Right Level (TaRL)** menawarkan cara praktis untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah India **Pratham**, pendekatan ini berfokus pada anak-anak yang sudah bersekolah tetapi belum memiliki keterampilan dasar dalam literasi dan numerasi. **TaRL mengelompokkan anak berdasarkan tingkat kemampuannya (bukan berdasarkan usia)** dan menerapkan asesmen formatif berbasis kelas secara berkelanjutan untuk memantau serta mengatasi kesenjangan belajar. Siswa yang tertinggal kemudian dapat diberikan pembelajaran tambahan melalui **pendidikan remedial atau mengejar ketertinggalan**.

Sejumlah penelitian **uji coba terkontrol secara acak (randomized control trials, RCT)** telah dilakukan terhadap metode TaRL dan menunjukkan peningkatan hasil belajar yang signifikan.⁶⁴ Sebuah studi yang dilakukan di sekolah pemerintah di dua negara bagian India, **Uttar Pradesh dan Haryana**, menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan keterampilan bahasa masing-masing sebesar **0,7 dan 0,15 deviasi standar**.⁶⁵ Metode ini telah diterapkan di berbagai wilayah di India dan banyak negara di Afrika.

⁶² PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

⁶³ Logan, B. (2011). Examining Differentiated Instruction: Teachers Respond. *Research in Higher Education Journal*, pp. 1 - 13.

⁶⁴ JPAL (2022). Teaching at the Right Level to improve learning. <https://www.povertyactionlab.org/case-study/teaching-right-level-improve-learning>

⁶⁵ Banarjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M., Walton, M. (2016). Mainstreaming an Effective Intervention: Evidence from Randomized Evaluations of "Teaching at the Right Level" in India. https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/research-paper/TaRL_Paper_August2016.pdf

Di Indonesia, **TaRL telah diimplementasikan dalam skala kecil**, baik melalui program **INOVASI** maupun mitra lainnya. Evaluasi awal di **Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Tengah** menunjukkan hasil yang positif, terutama bagi siswa pemula.⁶⁶ **TaRL digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa berdasarkan tingkat kemampuannya, termasuk anak-anak yang kurang terlayani, anak penyandang disabilitas, dan anak dari latar belakang kurang beruntung.** Kemendikbudristek dan Kemenag juga telah mendukung penggunaan **Profil Belajar Siswa (PBS)** sebagai alat untuk mengidentifikasi anak penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus lainnya.

Selain itu, **krisis pembelajaran** tidak hanya menuntut fokus pada keterampilan dasar di tahun-tahun awal sekolah, tetapi juga **menggunakan pendidikan remedial/pengejaran ketertinggalan bagi siswa sekolah dasar tingkat atas dan jenjang pendidikan lanjut.** Pendidikan remedial telah lama menjadi strategi bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar, dan berbagai penelitian menunjukkan dampak positifnya.⁶⁷ **Catch-up Clubs** yang dikembangkan oleh Save the Children sering kali melibatkan fasilitator komunitas yang telah dilatih dalam metodologi TaRL. Evaluasi dampak dari Catch-up Clubs di lima negara menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan literasi siswa.⁶⁸

Sejalan dengan reformasi nasional pada Kurikulum Merdeka yang memprioritaskan keterampilan dasar serta keberhasilan awal pendekatan pembelajaran terdiferensiasi dalam program INOVASI, KREASI akan melaksanakan:

- 1.1.1 Membangun kapasitas guru dalam jabatan dan calon guru di sekolah pra-sekolah dan sekolah dasar dengan memberikan pelatihan tentang metode pengajaran yang berkeadilan, termasuk pembelajaran terdiferensiasi dan keterampilan dasar. Pelatihan ini akan menggunakan materi pembelajaran yang sudah tersedia dari Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, serta lembaga terkait lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
 - a. Mengembangkan dan mengimplementasikan asesmen formatif berbasis kelas yang adaptif, dengan memprioritaskan keterampilan dasar, termasuk pengembangan karakter; dan
 - b. Menggunakan Profil Belajar Siswa (PBS) dari Kemendikbudristek untuk mengidentifikasi anak penyandang disabilitas dan anak dari latar belakang kurang beruntung guna dilakukan asesmen formatif dan diagnostik lebih lanjut.
- 1.1.2 Mendistribusikan perangkat ajar dan bahan pembelajaran ke sekolah pra-sekolah dan sekolah dasar untuk mendukung pengembangan keterampilan literasi dan numerasi dasar. Bahan yang didistribusikan mencakup sumber daya pengajaran dan pembelajaran, bahan

⁶⁶ Jazuli, L. (2022). Teaching at the Right Level (TaRL) through the all Smart Children Approach (SAC) Improves Students' Literature Ability. *Progres Pendidikan*, 3(3), 156–165.

⁶⁷ Schwartz, A. C. (2012). Remedial Education Programs to Accelerate Learning for All. *GPE Working Paper Series on Learning No. 11*.

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/564671468151507990/pdf/797830WP0Anali0Box0379789B00PUBLIC0.pdf>

⁶⁸ Save the Children (2022). Catch Up Clubs Evidence Update. <https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Catch-up-Clubs-evidence-update.pdf/>

bacaan, serta alat asesmen berbasis kelas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Proses distribusi akan memanfaatkan bahan yang sudah tersedia dari Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, serta lembaga terkait lainnya, dengan melibatkan sekolah dan pemerintah daerah.

- 1.1.3 Mendirikan klub intervensi remedial (Catch-up Clubs) bagi siswa dengan menggunakan strategi pengajaran yang ditargetkan untuk mendukung kemajuan belajar mereka.
- 1.1.4 Melaksanakan kampanye kesadaran sosial dan perubahan perilaku yang berfokus pada pendidikan anak usia dini/pra-sekolah, bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT, dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengikutsertakan calon guru (pre-service teachers) dalam program ini memastikan bahwa pendidik baru akan memasuki profesinya dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum baru secara efektif. Dengan membekali mereka sejak awal dengan pemahaman yang kuat mengenai pendekatan pembelajaran terdiferensiasi dan strategi pembelajaran berbasis kompetensi, kita sedang mempersiapkan generasi pendidik yang mampu memenuhi kebutuhan siswa yang beragam sejak awal karier mereka.

Pendekatan proaktif ini berkontribusi pada tujuan utama program, yaitu memastikan pelaksanaan reformasi kurikulum yang berkelanjutan dan konsisten.

Keluaran 1.2: Mendukung Dinas Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Implementasi Reformasi Kurikulum dan Asesmen (praktik)

Sebuah studi Bank Dunia di Indonesia tentang tata kelola lokal dan kinerja pendidikan di 50 kabupaten/kota pada tahun 2010-an menunjukkan bahwa **tata kelola yang lebih baik mengarah pada kinerja pendidikan yang lebih baik**. Pada saat itu, ditemukan adanya variasi dalam kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pemantauan berbasis bottom-up, yaitu **hanya 12% pemerintah kabupaten/kota yang menggunakan rencana tingkat sekolah sebagai dasar perencanaan mereka**. Laporan yang sama menekankan bahwa **peningkatan kapasitas harus bersifat multisektoral dan melibatkan mitra lokal**.⁶⁹

Melalui pendekatan **anchor partnership** Save the Children (yang dijelaskan dalam bagian **Pengaturan Implementasi**), mitra lokal yang telah diakui dan memiliki efektivitas tinggi akan dipilih untuk bekerja dalam **pendekatan dua jalur (praktik dan kebijakan)** bersama pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk:

- Menggulirkan **reformasi Kurikulum Merdeka (KM)** di tingkat kabupaten/kota,
- Mendukung sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis sekolah dan asesmen yang memprioritaskan **keterampilan dasar** serta **pengembangan karakter**.

⁶⁹ Bank Dunia (2013). Local Governance and Education Performance in Indonesia: Surveying the Quality of Local Education Governance in 50 Districts. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/26/local-governance-and-education-performance-in-indonesia>

Kemitraan ini juga akan mendukung **upaya pemerintah dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis sekolah yang kontekstual**, dengan peluang untuk memasukkan kurikulum lokal dan menangani berbagai isu pendidikan, seperti:

- Sensitivitas gender,
- Anak penyandang disabilitas dan anak dari latar belakang kurang beruntung,
- Perbedaan budaya dan bahasa, serta
- Kekerasan berbasis gender dan perundungan di sekolah.

Anak-anak yang paling terpinggirkan akan menjadi prioritas dengan pengembangan **bahan ajar yang kontekstual**, dan program ini secara khusus akan mendorong penguatan unit layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, seperti **Unit Layanan Disabilitas (ULD)**.

Selain itu, program ini juga akan mendukung peluang untuk **mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim dan lingkungan. Alat Climate Resilient Programming in Education** dari Save the Children menyediakan kerangka kurikulum dan asesmen yang jelas untuk mengidentifikasi **risiko dan bahaya iklim langsung maupun tidak langsung**, serta mengembangkan **tindakan mitigasi dan adaptasi** guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.⁷⁰

Keluaran ini akan mendukung Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam mengadaptasi Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah. Program ini akan:

- 1.2.1 Melaksanakan pelatihan internal di sekolah untuk mengembangkan atau menyesuaikan kurikulum berbasis sekolah, yang disesuaikan dengan kesiapan dan kapasitas sekolah.
- 1.2.2 Membangun dan meningkatkan kapasitas guru dalam mengidentifikasi kesenjangan dalam kurikulum lokal serta mengembangkan solusi kurikulum yang relevan dan berbasis lokal.
- 1.2.3 Mengumpulkan praktik pengajaran yang menjanjikan dan praktik terbaik untuk dimasukkan ke dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan platform pendidikan digital lainnya yang mendukung pengembangan keterampilan literasi dan numerasi.
- 1.2.4 Membangun kapasitas dalam pendidikan yang responsif terhadap GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, dan lembaga terkait lainnya.
- 1.2.5 Mengembangkan, menyesuaikan, atau mengontekstualisasikan materi pendidikan inklusif dengan menggunakan pendekatan Universal Design for Learning (UDL), dengan memastikan materi tersebut sensitif terhadap kebutuhan budaya, bahasa, dan keberagaman siswa. Ini mencakup menyusun, mengembangkan, dan mendistribusikan buku anak yang kontekstual, sesuai usia, berperspektif gender, serta inklusif terhadap anak penyandang disabilitas.

⁷⁰ Save the Children (2022). Climate Resilient Programming in Education (CRPE).
<https://resourcecentre.savethechildren.net/document/climate-resilient-programming-in-education-crpe/>

- 1.2.6 Menyelenggarakan lokakarya pembelajaran dan koordinasi serta menyediakan alat bantu untuk mendukung pembentukan dan/atau penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) guna memastikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
- 1.2.7 Membangun kapasitas tentang pendidikan perubahan iklim menggunakan metodologi pembelajaran berbasis proyek di tingkat kabupaten/kota, bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, dan lembaga terkait lainnya.
- 1.2.8 Mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek di sekolah untuk mengatasi isu lingkungan dan perubahan iklim. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan lokakarya serta penggunaan modul pendidikan, seperti Gaya Hidup Berkelanjutan, yang menangani tantangan lingkungan yang lebih luas serta mempromosikan ketahanan terhadap perubahan iklim. Implementasi dilakukan bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, dan lembaga terkait lainnya.

Keluaran 1.3: Mendorong adopsi Kurikulum Merdeka di tingkat lokal untuk meningkatkan hasil belajar (kebijakan)

Merdeka Belajar menetapkan kebijakan nasional yang diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan keputusan di tingkat **provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah**. Meskipun secara teori hal ini seharusnya terjadi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa **desentralisasi layanan dasar tidak selalu menghasilkan hasil yang diharapkan**. Namun, berbagai uji coba yang mendukung **penguatan kapasitas pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat** (termasuk keterlibatan langsung orang tua) telah terbukti efektif dalam **mengubah perilaku guru dan meningkatkan hasil belajar siswa**.⁷¹ Keluaran ini akan mendukung **adopsi kebijakan dan regulasi kurikulum serta asesmen yang relevan di tingkat kabupaten/kota**, dengan manajemen pengetahuan yang disertai **pelibatan pemangku kepentingan masyarakat dalam mendukung pendidikan**.

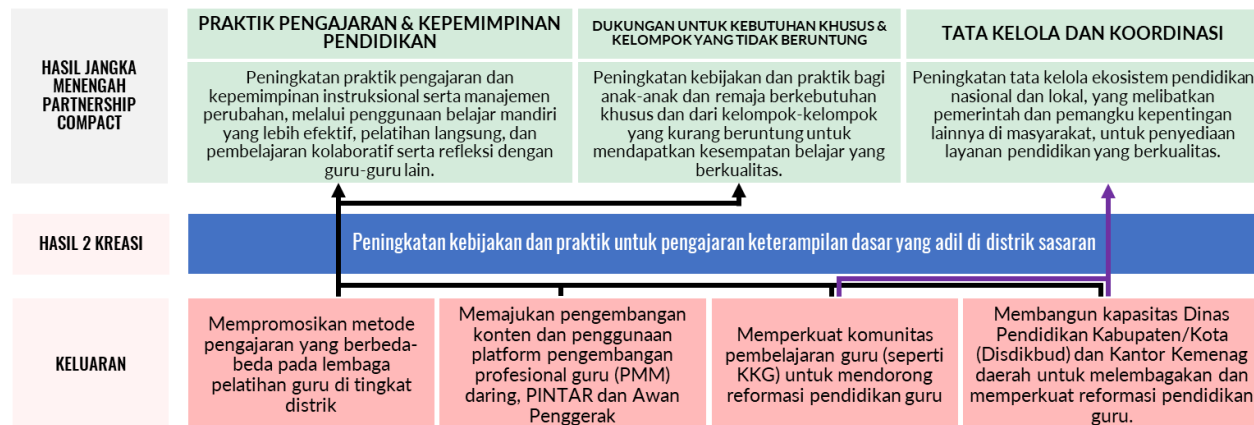
KREASI akan mendorong kebijakan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan Rapor Pendidikan ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, dan pedoman teknis pemerintah daerah di seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Secara khusus, program ini akan:

- 1.3.1 Meningkatkan kapasitas dalam pengembangan kebijakan tingkat kabupaten/kota yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka serta mendorong pembelajaran keterampilan dasar, bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT, INOVASI, dan lembaga terkait lainnya.
- 1.3.2 Menghasilkan dan menyebarkan bukti untuk mendukung evaluasi serta penyempurnaan kebijakan terkait kurikulum dan asesmen.
- 1.3.3 Melibatkan konsorsium pendidikan tingkat kabupaten/kota serta mekanisme koordinasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan adanya masukan dan dukungan dari

⁷¹ INOVASI (2023). Insights from INOVASI Volume II: INOVASI and the Reform of Indonesian Education. <https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2023/11/2023-public-INOVASI-insights-from-INOVASI-vol-2.pdf>; World Bank (2020). Community Participation and Teacher Accountability: Improving Learning Outcomes in Remote Areas in Indonesia. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/552081590478574722/pdf/Community-Participation-and-Teacher-Accountability-Improving-Learning-Outcomes-in-Remote-Areas-of-Indonesia.pdf>

komunitas dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi inisiatif pendidikan.

Hasil 2: Praktik Pengajaran



Praktik pengajaran sangat berkaitan erat dengan cara guru dalam menerapkan **kurikulum dan asesmen**. Namun, karena reformasi **Merdeka Belajar (MB)** lebih menitikberatkan pada kurikulum dan asesmen, maka aspek ini dipisahkan menjadi komponen pertama dalam program ini. Pengembangan profesional guru memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan berbagai program peningkatan kapasitas guru yang signifikan. Evolusi program pengembangan profesional guru di Indonesia berkembang dari:

- **1980-an: Pemantapan Kerja Guru (PKG)** – model pelatihan guru dalam jabatan berbasis cascade (pelatihan berjenjang) yang dikombinasikan dengan kunjungan awal ke kelas, tetapi menyebabkan penurunan kualitas.
- **1990-an: Kelompok Kerja Guru (KKG)** – kelompok kerja guru berbasis klaster yang memiliki potensi keberhasilan sebagaimana dibuktikan secara global dan di Indonesia melalui program **Guru BAIK dari INOVASI**. Namun, KKG sering kali kekurangan dukungan dari pemerintah daerah dan kurangnya motivasi guru, sehingga kegiatan lebih banyak berfokus pada perencanaan pembelajaran dan asesmen siswa.
- **2005: Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)** – program peningkatan kompetensi bagi guru bergelar sarjana untuk memperoleh sertifikasi guru. Program ini menghasilkan kenaikan gaji guru tetapi hanya memberikan peningkatan yang **moderat** terhadap kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa.⁷²

Dengan belajar dari dan membangun di atas model pengembangan profesional guru sebelumnya, **Merdeka Belajar menawarkan pendekatan baru dalam mengidentifikasi, melatih, dan memberdayakan guru sebagai agen perubahan dalam pembelajaran siswa.**

⁷² Bank Dunia (2015). Teacher Certification and Beyond: An empirical evaluation of the teacher certification program and education quality improvements in Indonesia. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/129551468196175672/pdf/104599-WP-P102259-PUBLIC-Teacher-Certification-and-beyond-final.pdf>

Guru akan memiliki **otonomi yang lebih besar** dan dapat mengakses **sumber daya berkualitas tinggi dan relevan**. Perubahan ini mencakup:

- **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)** – program pengembangan profesional berkelanjutan yang mengombinasikan **pedagogi dan konten**, serta menggabungkan metode **pelatihan tatap muka dan daring**.
- **Integrasi teknologi dalam pendidikan**, memungkinkan guru untuk menggunakan **alat dan sumber daya digital** dalam mengajar.

Salah satu instrumen utama dalam reformasi ini adalah **Platform Merdeka Mengajar (PMM)**, yaitu **platform berbasis web untuk guru** yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. PMM mendukung guru dalam menerapkan **Kurikulum Merdeka (KM)** dengan menyediakan berbagai **materi kurikulum dan asesmen**. Melalui platform ini, guru dapat:

- Mengunggah dan berbagi materi pembelajaran,
- Mengakses inspirasi dan referensi dari rekan sejawat,
- Mengembangkan literasi digital, dan
- Memantau perkembangan kinerja guru dengan melibatkan kepala sekolah dalam menetapkan dan memantau **target kinerja individu**.

Selain itu, kemajuan teknologi dalam lingkungan pendidikan juga memberikan peluang baru dalam **manajemen sekolah dan guru**. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap perubahan transformasional, **KREASI akan berkontribusi langsung terhadap reformasi praktik pengajaran dalam Merdeka Belajar**, guna meningkatkan kualitas pembelajaran siswa secara sistemik dan berkelanjutan.

Keluaran 2.1: Mempromosikan Pedagogi Pembelajaran Terdiferensiasi di Lembaga Pelatihan Guru Tingkat Kabupaten/Kota (praktik)

Keluaran ini akan melengkapi **pelatihan guru** yang disediakan dalam **Hasil Kurikulum dan Asesmen**, dengan berfokus pada **penyedia pelatihan guru di tingkat kabupaten/kota** yang bertanggung jawab dalam menyediakan **pengembangan profesional berkelanjutan (PKB) bagi guru prajabatan dan dalam jabatan**, sehingga memastikan keberlanjutan program.

Meskipun pendekatan ini lebih inovatif dan maju dibandingkan metode sebelumnya, banyak guru masih belum memahami **pembelajaran terdiferensiasi**. Akibatnya, mereka masih mengandalkan **metode pengajaran tradisional**.⁷³ Kompetensi guru dalam **mengembangkan aktivitas berbasis keterampilan dasar yang berpusat pada siswa** masih belum memadai.⁷⁴ Oleh karena itu,

⁷³ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

⁷⁴ Solihin, L., Pratiwi, I., Atmadiredja, G., & Utama, B. (2020). Darurat Literasi Membaca Di Kelas Awal : Tantangan Membangun SDM Berkualitas. Masyarakat Indonesia, 46(1), 34-48.

diperlukan **intervensi bagi guru prajabatan dan dalam jabatan** untuk meningkatkan pemahaman dan penerapannya.

Diperlukan **pembaruan dan perancangan ulang mata kuliah keterampilan dasar** serta intervensi terkait dalam **lembaga pelatihan guru dan universitas**. Selain itu, **pembelajaran berbasis proyek (project-based learning)** masih belum dipahami dengan baik, sehingga banyak peluang terlewatkan dalam memahami dan menangani tantangan lokal terkait **perlindungan anak, GEDSI, dan perubahan iklim**.

Beberapa kritik awal terhadap **PKB** mencakup:

- **Kualitas instruktur yang rendah,**
- **Desain program yang kurang optimal,**
- **Durasi pelatihan yang tidak mencukupi,** serta
- **Kurangnya pemahaman praktik pengajaran, peragaan pembelajaran yang aplikatif, dan tindak lanjut pascapelatihan.**

Hal-hal ini berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas program.⁷⁵ **Kunjungan lapangan mengungkapkan kurangnya keterlibatan guru dan siswa yang diharapkan dalam menciptakan pembelajaran yang transformatif.**

Sebagai respons terhadap tantangan ini, keluaran ini akan mencakup:

- 2.1.1 Melaksanakan lokakarya dan pemantauan bersama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau universitas untuk mengintegrasikan metode pengajaran yang berkeadilan dalam literasi dan numerasi, termasuk pembelajaran terdiferensiasi di semua mata pelajaran, ke dalam kurikulum LPTK.
- 2.1.2 Melaksanakan lokakarya dan pemantauan bersama dengan LPTK atau universitas untuk meningkatkan kapasitas calon guru (pre-service teachers) dalam transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menyenangkan.
- 2.1.3 Memberikan penguatan kapasitas bagi guru dalam jabatan yang sedang meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran terdiferensiasi, keterampilan dasar, dan transisi PAUD yang menyenangkan, melalui kolaborasi dengan Kemendikbudristek, Kemenag, Balai Guru Penggerak (BGP), dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP).

Keluaran 2.2: Mengembangkan Konten dan Pemanfaatan Platform Pengembangan Profesional Guru Daring (PMM, PINTAR, dan Awan Penggerak) (praktik)

Pengembangan profesional guru yang berkelanjutan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Model terbaik dari pengembangan profesional guru **harus selaras dengan kebutuhan guru**, bersifat **praktis**, serta memungkinkan guru untuk **belajar**,

⁷⁵ Revina, Shintia (2020). Four Decades of Teacher Professional Development in Indonesia: One Step Forward and Two Steps Back. SMERU: Jakarta. Accessed May 21, 2024. <https://rise.smeru.or.id/en/blog/four-decades-teacher-professional-development-indonesia-one-step-forward-two-steps-back>

merefleksikan, dan mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, model ini harus **berkelanjutan** dan memberikan kesempatan bagi guru untuk terus belajar serta mendapatkan dukungan dari rekan sejawat maupun pengawas pendidikan.

Namun, banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam memastikan pelaksanaan **pengembangan profesional guru (TPD) yang konsisten**, sehingga menyebabkan pendekatan pelatihan yang **ad-hoc** (tidak terencana dengan baik), **tidak merata dalam aksesibilitas**, serta **bersifat seragam (one size fits all)** tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik guru.

Perkembangan teknologi telah memungkinkan tersedianya **platform daring untuk pengembangan profesional guru**, yang semakin relevan terutama setelah pandemi COVID-19. **Platform pelatihan daring memungkinkan pembelajaran secara asinkron dan sinkron:**

- **Pelatihan asinkron** memungkinkan guru untuk mengakses modul kapan saja tanpa terikat waktu. Contohnya: **video pembelajaran yang telah direkam sebelumnya, forum diskusi daring, dan dokumen kolaboratif.**
- **Pelatihan sinkron** memungkinkan pembelajaran secara "real-time", misalnya melalui **video konferensi, webinar, dan pesan instan.**

Namun, **hanya menyediakan berbagai peluang belajar tidak secara otomatis menghasilkan perubahan dalam hasil belajar siswa.** Agar teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif, guru harus memiliki: (1) **Akses** ke pelatihan profesional guru daring (mudah diakses dan didorong penggunaannya), (2) **Kemampuan menerapkan** konsep TPD (menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengajaran di kelas), dan (3) **Keterlibatan aktif** dalam TPD (secara aktif mengikuti pembelajaran secara berkelanjutan).⁷⁶

PMM telah menjadi salah satu platform utama yang digunakan **Merdeka Belajar** untuk mendukung guru. Platform ini menyediakan **materi ajar dan asesmen** yang selaras dengan **Kurikulum Merdeka (KM)**, serta menawarkan berbagai sumber daya bagi guru dalam menerapkan **pembelajaran aktif dan asesmen berbasis kelas.**

Kemendikbudristek melaporkan bahwa 2,6 juta guru telah terdaftar di PMM, tetapi kunjungan lapangan awal mengungkapkan bahwa pemanfaatan platform ini masih terhambat oleh:

- **Keterbatasan waktu** guru,
- **Kurangnya dorongan dari kepala sekolah dan pejabat pendidikan** untuk menggunakannya,
- **Akses internet yang terbatas**, serta
- **Kurangnya pemahaman dalam menggunakan platform tersebut secara optimal.**⁷⁷

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Kemendikbudristek (2024). Hadapi Era Digital, Kemendikbudristek Optimalkan Peran Orang Tua dan Guru dalam Membimbing Anak (Facing the Digital Era, the Ministry of Education and Culture Optimizes the Role of Parents and Teachers in Guiding Children). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/02/hadapi-era-digital-kemendikbudristek-optimalkan-peran-orang-tua-dan-guru-dalam-membimbing-anak>. And field visits

Secara umum, norma sosial terkait **pembelajaran mandiri dan pemanfaatan platform digital masih baru**, sehingga memerlukan **dukungan lanjutan**.⁷⁸ Guru menunjukkan **minat tinggi terhadap PMM**, terutama dalam:

- Panduan pemanfaatan platform secara maksimal,
- Berbagi praktik terbaik, serta
- Pengembangan **portofolio guru** (sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk mengevaluasi kinerja guru).⁷⁹

Dalam skala terbatas, **KREASI akan mengadvokasi dukungan pemerintah**, bekerja sama dengan **sektor swasta**, serta mengeksplorasi peluang kemitraan inovatif untuk menyediakan perangkat keras (komputer), perangkat lunak, dan konektivitas yang diperlukan.

Untuk guru yang tidak memiliki akses internet dan tidak dapat menggunakan PMM, program ini akan **mengeksplorasi pemanfaatan Awan Penggerak**, yaitu versi offline dari PMM yang dirancang khusus untuk **guru di daerah 3T** dengan sistem pembelajaran asinkron.⁸⁰ Saat ini, Awan Penggerak telah beroperasi di enam provinsi dan dapat menjadi solusi bagi beberapa kabupaten dalam area implementasi KREASI, khususnya **Ketapang, Morotai, Nias Utara, dan Nias Selatan**, yang memiliki kecamatan tanpa akses internet.⁸¹

Melalui keluaran ini, program akan mendukung guru dalam mengembangkan dan memanfaatkan PMM, PINTAR, dan Awan Penggerak (jika diperlukan) dengan cara:

- 2.2.1 Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pembelajaran, terutama yang mendukung pengembangan keterampilan literasi dan numerasi pada jenjang pra-sekolah dan sekolah dasar, dengan memastikan materi yang dihasilkan: responsif terhadap GEDSI, ramah anak, serta mengintegrasikan isu perubahan iklim dan lingkungan. Proses ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2.2.2 Meningkatkan keterampilan digital guru, termasuk melalui pelatihan daring, bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenag, dan lembaga terkait lainnya.
- 2.2.3 Memberikan asistensi teknis dan panduan kepada guru, dengan memanfaatkan Guru Penggerak atau sumber daya tingkat kabupaten/kota lainnya, guna memfasilitasi serta memimpin komunitas pembelajaran bagi guru.

⁷⁸ Bank Dunia (2022). The digital future of teacher training in Indonesia: What's next?

<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e47c923a-1d76-5476-bde0-4088c0ef2523/content>

⁷⁹ Kemendikbudristek (2024). Sederet Manfaat Awan Penggerak dalam Percepatan Pemerataan Akses Pendidikan.

<https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/sederet-manfaat-awan-penggerak-dalam-percepatan-pemerataan-akses-pendidikan>

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

Kelauran 2.3: Memperkuat Komunitas Pembelajaran Guru (seperti KKG) untuk Mendukung Reformasi Pendidikan Guru (praktik)

Pemanfaatan **komunitas pembelajaran guru** untuk meningkatkan praktik pengajaran dapat menghasilkan perubahan perilaku mengajar, **bergeser dari metode pembelajaran yang berpusat pada guru ke metode yang berpusat pada siswa**, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.

Beberapa studi menunjukkan bahwa melalui komunitas guru:

- Guru menyesuaikan kecepatan pengajaran untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa,
- Guru menemukan metode pembelajaran literasi yang lebih menyenangkan, seperti **membaca buku kelas, menulis puisi, dan menulis surat**.⁸²

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembentukan **komunitas pembelajaran guru**, tetapi **pemanfaatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan komunitas praktik lainnya masih sangat terbatas**, bahkan ada yang tidak aktif sama sekali. **KKG belum dimanfaatkan secara maksimal** untuk mendukung reformasi **Merdeka Belajar** dan meningkatkan hasil belajar siswa.

Hasil kunjungan lapangan diagnostik mengungkapkan bahwa **guru hanya menggunakan KKG untuk menyusun soal ujian**, tanpa adanya diskusi atau pengembangan praktik mengajar. **Belum banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas KKG** agar dapat berfungsi sebagai ruang kolaborasi guru dalam meningkatkan keterampilan pedagogik dan inovasi pembelajaran.⁸³

Melalui keluaran ini, program akan:

- 2.3.1 Berkolaborasi dengan Balai Guru Penggerak (BGP), komunitas Guru Penggerak, dan LPTK untuk memberikan penguatan kapasitas kepada KKG serta komunitas belajar guru lainnya. Membangun jejaring dan lingkaran diskusi antar-guru agar mereka dapat berbagi praktik terbaik dan saling mendukung dalam menangani tantangan serta mencari solusi bersama.
- 2.3.2 Membentuk, merevitalisasi, atau membimbing komunitas pembelajaran guru (seperti KKG) untuk mendukung reformasi pendidikan Merdeka Belajar. Komunitas ini akan berfokus pada pembelajaran terdiferensiasi, reformasi kurikulum, dan asesmen, sehingga guru dapat berbagi keahlian, menyesuaikan praktik pembelajaran dengan kebutuhan lokal, termasuk mengintegrasikan isu lintas sektor seperti GEDSI, perlindungan anak, dan perubahan iklim, serta menyelesaikan tantangan umum secara kolaboratif.
- 2.3.3 Menyelenggarakan sesi pembelajaran dan lokakarya untuk mendukung KKG berbasis sekolah dan kabupaten/kota, serta komunitas daring PMM, dengan menyediakan asistensi teknis dan pendampingan. Memanfaatkan Guru Penggerak sebagai narasumber untuk

⁸² Vescio, V., Ross, D., Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. *Teaching and Teacher Education* 24, pp. 80-91.

<https://www.psychosphere.com/A%20review%20on%20research%20on%20the%20impact%20of%20PLCs%20on%20teaching%20practice%20&%20student%20learning%20by%20Vescio,%20Ross%20&%20Adams.pdf>

⁸³ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

berbagi pengalaman dan memberikan arahan kepada guru lainnya. Memastikan keberlanjutan komunitas guru, dengan mendorong pemanfaatan dana publik daerah untuk mendukung KKG serta membangun kemitraan dengan sektor swasta guna memperkuat inisiatif komunitas guru.

Keluaran 2.4: Membangun Kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Kemendikbudristek) dan Kantor Wilayah Kemenag untuk Menginstitusionalisasi serta Memperkuat Reformasi Pendidikan Guru (kebijakan)

Melalui keluaran ini, program akan:

- 2.4.1 Menyelenggarakan sesi koordinasi dan pembelajaran secara berkala untuk mendorong pemanfaatan pendanaan pemerintah daerah yang sudah tersedia (seperti BOSDA dan APBD) dalam program pengembangan profesional guru, dengan fokus pada pelatihan guru untuk mendukung pembelajaran keterampilan dasar siswa.
- 2.4.2 Menyelenggarakan sesi koordinasi dan pembelajaran secara berkala untuk mempromosikan pemanfaatan skema pemerintah yang sudah ada, seperti hibah PAUD (BOP PAUD, APBD) dan dana sekolah (BOS), dalam program pengembangan profesional guru, dengan fokus pada pelatihan yang mendukung keterampilan dasar siswa.
- 2.4.3 Membangun kapasitas pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Kemendikbudristek), pejabat Kemenag tingkat wilayah, pengawas sekolah, dan guru utama untuk mendukung kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan transisi PAUD yang menyenangkan serta pembelajaran keterampilan dasar di pendidikan anak usia dini.
- 2.4.4 Membangun kapasitas pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Kemendikbudristek), pejabat Kemenag tingkat wilayah, pengawas sekolah, dan guru utama untuk mendukung kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan transisi PAUD yang menyenangkan serta pembelajaran keterampilan dasar di pendidikan anak usia dini.

Hasil 3: Kepemimpinan Pendidikan



Reformasi kepemimpinan pendidikan di kalangan kepala sekolah berfokus pada pergeseran peran dari tanggung jawab administratif ke **kepemimpinan instruksional**. Penelitian menunjukkan bahwa **kurang dari 25% waktu kepemimpinan sekolah** digunakan untuk meningkatkan praktik pengajaran dan pembelajaran. Namun, kepemimpinan yang baik terbukti mampu meningkatkan **hasil belajar siswa secara signifikan**. Dalam sebuah studi yang mencakup 65 negara, sekolah yang dipimpin oleh **25% kepala sekolah dengan kinerja terbaik** memiliki hasil belajar siswa yang setara dengan **tiga bulan tambahan pembelajaran** dibandingkan sekolah yang dipimpin oleh **25% kepala sekolah dengan kinerja terendah**.⁸⁴ Selain itu, meskipun dengan dukungan finansial yang minimal, **peningkatan kepemimpinan sekolah dapat memberikan hasil pembelajaran yang substansial**. Sebuah studi tiga tahun tentang program kepemimpinan sekolah di Brasil yang melibatkan pejabat kabupaten dan kepala sekolah menengah (dengan hanya peningkatan biaya sebesar 5%) menghasilkan **peningkatan hasil belajar siswa sebesar 30%**. Namun, tidak semua program kepemimpinan sekolah menghasilkan peningkatan hasil belajar. Program yang efektif harus: (a) **Berbasis data** dan memanfaatkan data hasil belajar siswa, (b) **Memprioritaskan pengembangan profesional guru** dengan fokus pada keterampilan dasar, dan (c) Melengkapi **model pelatihan tradisional** dengan pendekatan tambahan seperti **pendampingan atau lingkaran diskusi antar-rekan (peer circles)**.

Di Indonesia, kepemimpinan pendidikan memberikan sedikit dukungan kepada guru terkait kualitas instruksional mereka setelah pelatihan pengembangan profesional yang disediakan di tingkat kabupaten/kota. Akibatnya, tidak jarang sekolah dengan “kinerja baik” justru memiliki **hasil belajar siswa yang buruk**.

Kepemimpinan sekolah di Indonesia umumnya **bersifat top-down**, dengan keterlibatan minimal dari guru, komunitas, dan orang tua melalui komite sekolah. Partisipasi kepala sekolah lebih sering bersifat satu arah, dengan informasi yang disampaikan tanpa adanya dialog timbal balik.⁸⁵ Selain itu, tanpa **penggunaan data yang konsisten, seperti Rapor Pendidikan**, kepala sekolah kesulitan dalam merumuskan dan mengimplementasikan visi yang selaras dengan kebutuhan belajar siswa dan guru.

Prinsip ramah anak, GEDSI, dan ramah iklim belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola sekolah. Upaya yang ada masih terbatas, seperti **sanitasi dan kebersihan sekolah**, tanpa pendekatan strategis untuk menangani isu-isu yang lebih luas terkait pendidikan berpusat pada anak, inklusif, dan sadar lingkungan.⁸⁶

Dalam konteks kepemimpinan pendidikan di Indonesia, terdapat **kesenjangan gender yang mencolok**. Menurut data Kemendikbudristek:

⁸⁴ Global School Leaders (2020). Evidence Review Report: A review of empirical research on school leadership in the Global South. https://drive.google.com/file/d/1gqEGmfTmnk9QKF5gLiFzTS6b1_mRscrf/view

⁸⁵ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

⁸⁶ Ibid.

- **72% guru di tingkat sekolah dasar adalah perempuan,**⁸⁷ tetapi
- Hanya **sepertiga kepala sekolah di bawah Kemendikbudristek dan seperlima kepala sekolah di bawah Kemenag adalah Perempuan.**⁸⁸

Kesenjangan ini mengungkapkan adanya **ketidaksetaraan gender dalam posisi kepemimpinan**. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang dipimpin oleh perempuan cenderung memiliki manajemen yang lebih baik dan atmosfer belajar yang lebih suportif. Namun, **norma sosial dan peran gender historis di Indonesia** telah menghambat perempuan untuk memasuki peran kepemimpinan. Perempuan sering kali diharuskan memiliki **kualifikasi yang lebih tinggi atau pengalaman profesional yang lebih besar dibandingkan laki-laki** untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Reformasi **Merdeka Belajar (MB)** mengubah peran kepala sekolah dari beban administratif menjadi pendukung pengembangan profesional guru. Reformasi ini memberi kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan pelatihan profesional kepada guru, dan menilai kinerja guru guna meningkatkan hasil belajar siswa.⁸⁹

Melalui **Rapor Pendidikan**, kinerja kepala sekolah diukur berdasarkan tiga indikator utama:

1. **Komunikasi dan implementasi visi dan misi untuk meningkatkan pembelajaran,**
2. **Manajemen dan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada hasil belajar siswa, dan**
3. **Program, insentif, dan sumber daya yang mendukung pembelajaran serta refleksi guru.**⁹⁰

Merdeka Belajar juga memiliki beberapa program unggulan untuk mendukung pengembangan kepala sekolah saat ini dan di masa depan, termasuk: **Guru Penggerak**, dan **Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)** atau komunitas kerja kepala sekolah. Kedua program ini akan didukung oleh KREASI. Sejalan dengan reformasi Merdeka Belajar dalam kepemimpinan pendidikan, KREASI akan **berkontribusi langsung terhadap perubahan transformasional dalam kepemimpinan sekolah**, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Keluaran 3.1: Mendukung Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan Instruksional untuk Mengimplementasikan Merdeka Belajar guna Meningkatkan Keterampilan Dasar (praktik)

Sebagai bagian dari reformasi **Merdeka Belajar (MB)**, pemerintah meluncurkan Program **Guru Penggerak (PGP)** sebagai inisiatif strategis untuk **membangun kapasitas calon pemimpin pendidikan**. Diluncurkan pada tahun 2020, GP bertujuan untuk mengembangkan **kepemimpinan**

⁸⁷ Kemendikbudristek (2024). Data Pokok Pendidikan: Data Guru. <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru>

⁸⁸ The Conversation (2020). Indonesian female school heads: why so few and why we need more? <https://theconversation.com/indonesian-female-school-heads-why-so-few-and-why-we-need-more-135939>

⁸⁹ Kemendikbudristek (2024). Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah: Presentasi oleh Ditjen GTK (Teacher and Principal Performance Management: Presentation by the Directorate General of Teacher and Educational Staff).

⁹⁰ *Rapor Pendidikan*, Instructional Leadership

pendidikan dan keterampilan pedagogis di kalangan guru yang berpotensi menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau pemimpin di sektor pendidikan.

Sejak 2020, pemerintah telah melatih **Guru Penggerak secara bertahap** dengan target **100.000 Guru Penggerak pada tahun 2024**. Program ini terdiri dari:

- **Tujuh lokakarya tatap muka,**
- **Pelatihan daring berkelanjutan,** serta
- **Pendampingan individu melalui coaching dan mentoring selama enam bulan.**

Lokakarya tatap muka mencakup **kompetensi guru, pengembangan komunitas, kepemimpinan instruksional, praktik coaching, kolaborasi untuk program yang berpusat pada siswa, serta pengembangan diri dan sekolah secara berkelanjutan**. Pelatihan daring berfokus pada **kepemimpinan instruksional dan pembelajaran berpusat pada siswa melalui sepuluh modul**. Evaluasi awal **Bank Dunia (WB)** terhadap program GP menemukan bahwa program ini **diterima dengan baik oleh para guru, dengan 86% guru menilai program ini bermanfaat, dibandingkan dengan hanya 53% guru pada program pelatihan lainnya**.

Menggunakan alat observasi kelas WB "**TEACH**", ditemukan bahwa **guru yang mengikuti program GP mengalami peningkatan praktik mengajar** terutama dalam aspek **budaya kelas dan disiplin positif**, serta mendukung guru lain dalam sekolahnya (terutama jika mereka satu-satunya Guru Penggerak di sekolah tersebut). Program ini meningkatkan kualitas pengajaran guru sebesar **0,8 hingga 1,1 deviasi standar**.

Selain itu, program GP juga meningkatkan **kepercayaan diri guru** dan memperbesar aspirasi mereka untuk menjadi kepala sekolah atau pemimpin pendidikan. Guru belum menunjukkan peningkatan keterampilan dalam pembelajaran terdiferensiasi, dan pengembangan keterampilan sosial-emosional belum maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa program GP masih perlu ditingkatkan dan perlu didukung oleh program pelengkap lainnya untuk memperkuat pembelajaran terdiferensiasi.⁹¹

KREASI akan memperkuat dan melengkapi program **Guru Penggerak** dengan menerapkan **INSPIRASI School Leaders Coaching Academy** bagi kepala sekolah yang sedang menjabat.⁹² Pendekatan ini dikembangkan oleh **Yayasan INSPIRASI** dan didasarkan pada model yang telah berhasil diterapkan oleh organisasi internasional **Global School Leaders** di **India, Malaysia, dan Kenya**.

Salah satu prinsip utama dalam model INSPIRASI adalah **melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di tingkat nasional dan daerah**, guna memastikan:

⁹¹ Bank Dunia (2023). Improving Teachers and School Leadership in Indonesia: Impact Evaluation of Guru Penggerak Program at the Primary Level. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099042224202520319/pdf/P17481518584b50aa1b6821291769b3ffb7.pdf>

⁹² Inspirasi School leaders Coaching Academy <https://inspirasifoundation.org/school-leaders-coaching-academy/>

- **Kesesuaian dengan kebijakan publik, serta**
- **Membuka peluang untuk perluasan skala program di masa depan.**

Dalam **School Leaders Coaching Academy**, kepala sekolah akan didampingi oleh **pelatih berpengalaman (coaches)** yang akan memberikan **bimbingan, pertanyaan reflektif, umpan balik konstruktif, serta dukungan berkelanjutan** dalam proses pengembangan kepemimpinan mereka.

Program ini dilakukan secara daring selama **dua bulan**, di mana peserta akan menerapkan materi yang dipelajari setiap minggu, lalu **merefleksikan pengalaman mereka dalam diskusi kelompok**. Kegiatan yang dilakukan mencakup:

- **Persiapan sebelum sesi coaching,**
- **Sesi coaching individu dan kelompok** dengan berbagai tema yang difasilitasi oleh pelatih, serta
- **Penerapan materi dalam tugas individu dan refleksi praktik kepemimpinan.**

Melalui keluaran ini, program akan:

- 3.1.1 Meningkatkan kapasitas kepala sekolah untuk mendorong, memotivasi, dan memberikan kesempatan bagi guru (khususnya guru perempuan di wilayah dengan minim kepala sekolah perempuan) untuk berpartisipasi dalam program pemerintah seperti Guru Penggerak guna menjadi calon kepala sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup:
 - a Menyelenggarakan sesi pembelajaran untuk mendukung guru yang memenuhi syarat dalam mengembangkan karier mereka berdasarkan evaluasi Rapor Pendidikan; dan
 - b Mendokumentasikan dan mempublikasikan praktik baik serta kisah sukses, termasuk pengalaman Guru Penggerak dan program pemerintah lainnya, dengan memberikan pengakuan dan penghargaan bagi peserta yang berhasil.
- 3.1.2 Menyelenggarakan sesi pembelajaran terkait akses pendanaan untuk pengembangan profesional guru, guna membantu kepala sekolah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
- 3.1.3 Melatih kepala sekolah saat ini dalam kepemimpinan instruksional berbasis model INSPIRASI, guna meningkatkan kapasitas mereka dalam mengawasi kualitas praktik pengajaran, mengoptimalkan pembelajaran terdiferensiasi, mengimplementasikan kurikulum, serta menggunakan asesmen berbasis kelas. Pelatihan ini akan menggunakan model Inspirasi School Leaders Coaching Academy.
- 3.1.4 Menyelenggarakan sesi pembelajaran dan pendampingan bagi kepala sekolah untuk mengimplementasikan regulasi guru yang sudah ada, dengan fokus pada transisi menuju asesmen portofolio guru, bekerja sama dengan Direktorat Guru Kemendikbudristek dan Kemenag.
- 3.1.5 Melatih komunitas sekolah untuk mendukung inklusivitas guru, perkembangan sosial-emosional, kesejahteraan guru, serta menciptakan lingkungan profesional yang positif bagi tenaga pendidik.

Keluaran 3.2: Menggunakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Prinsip GEDSI untuk Mendorong Budaya Kolaboratif Berbasis Sekolah dalam Merdeka Belajar dan Reformasi Manajemen Sekolah (praktik)

Sejalan dengan reformasi **Merdeka Belajar (MB)** yang mendorong pembentukan komunitas guru profesional, program ini juga akan memperkuat **komunitas belajar bagi kepala sekolah**. Secara khusus, reformasi ini akan memperkuat **Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)**, yang merupakan **versi KKG untuk kepala sekolah**. Diluncurkan pada **1990-an**, KKKS bertujuan untuk **menyediakan ruang bagi kepala sekolah untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan bersama**.

Selama bertahun-tahun, berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti **Tanoto Foundation**, telah menggunakan KKKS sebagai media untuk menyelenggarakan program pelatihan kepala sekolah. Beberapa **KKKS yang berfungsi secara optimal telah menunjukkan dampak positif**, terutama dalam meningkatkan **kinerja guru**.⁹³

Misalnya, sebuah studi penelitian tentang **KKKS di Kabupaten Keluang** menemukan bahwa **KKKS memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru**. Namun, di lapangan, banyak KKKS **tidak beroperasi secara optimal atau bahkan tidak aktif**, sehingga diperlukan **penguatan kapasitas** agar KKKS dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung reformasi pendidikan.⁹⁴ Oleh karena itu, **program ini akan mendukung pengembangan dan revitalisasi komunitas belajar kepala sekolah di wilayah sasaran** untuk:

- 3.2.1 Meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis sekolah yang efektif, dengan fokus pada pembelajaran keterampilan dasar yang dipandu oleh Rapor Pendidikan. Pelaksanaan ini akan dikoordinasikan dengan Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, dan lembaga terkait lainnya.
- 3.2.2 Menyelenggarakan lokakarya pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam manajemen sekolah yang lebih baik.
- 3.2.3 Melatih dan mengidentifikasi sumber daya/ahli dalam ekosistem pendidikan kabupaten/kota untuk menangani isu lintas sektor, termasuk: Teknologi Pendidikan, GEDSI, Perlindungan Anak, serta Adaptasi, mitigasi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
- 3.2.4 Melakukan penelitian, mengumpulkan bukti, dan berbagi praktik terbaik dengan kepala sekolah lainnya guna mendorong pertukaran pengetahuan dan strategi kepemimpinan yang efektif.

Keluaran 3.3: Mendukung Pengawas Sekolah dan Pejabat Pendidikan di Tingkat Kabupaten

⁹³ Mubadi, s., Lian, B., Eddy, S. (2021). The Effect of Principal Working Group Activities and Principal Professionalism on Teacher's Performance in Keluang District. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 565*, pp. 167 - 175. <https://www.atlantis-pub.com/article/125958966.pdf>

⁹⁴ PSPK (2024). Situation Analysis on Foundational Skills, GEDSI, Climate Change Education, and Child Protection in Early and Basic Education Sector

dalam Praktik Berbasis Data dan Inisiatif Kebijakan untuk Meningkatkan Keamanan Sekolah serta Hasil Belajar (praktik & kebijakan)

Penggunaan **data dalam pengelolaan sekolah**, terutama melalui **Rapor Pendidikan**, masih **kurang dimanfaatkan** di Indonesia. Padahal, **pemanfaatan data ini dalam mengubah arah kebijakan dan strategi sekolah** dapat memiliki dampak yang **signifikan dan berkelanjutan**.

Umpan balik dari kepala sekolah yang telah mulai menggunakan Rapor Pendidikan menunjukkan dampak positif:

- **Di bidang literasi:** Kepala sekolah menciptakan program peningkatan keterampilan membaca dan menggunakan **Early Grade Reading Assessment (EGRA)** untuk memantau serta mengukur keterampilan literasi siswa.
- **Di bidang keamanan sekolah dan kesejahteraan psikologis siswa:** Salah satu kepala sekolah menggunakan data skor rendah dalam aspek ini sebagai dasar untuk melibatkan guru dalam **merancang intervensi**. Sekolah kemudian **mengadakan kegiatan motivasi seperti pameran seni** untuk menyalurkan bakat siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif.⁹⁵

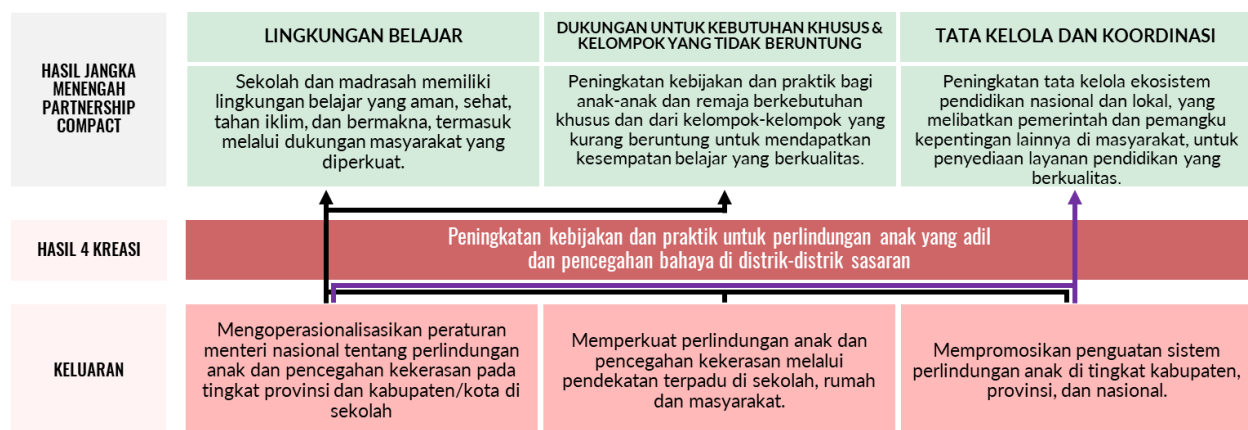
Program ini akan **memanfaatkan pencapaian awal ini dan terus memperkuat kapasitas pengambilan keputusan berbasis data**, melalui langkah-langkah berikut:

- 3.3.1 Meningkatkan kapasitas pejabat pendidikan kabupaten/kota untuk mendukung kepala sekolah dalam menggunakan data Rapor Pendidikan untuk pengelolaan dan perencanaan sekolah yang efektif. Ini mencakup penyelenggaraan lokakarya dan sesi pelatihan untuk kepala sekolah, serta memastikan bahwa data Rapor Pendidikan di tingkat kabupaten dikomunikasikan kepada pejabat pendidikan provinsi dan nasional guna memperkuat kebijakan pendidikan berbasis bukti. Implementasi ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, dan lembaga terkait lainnya.⁹⁶
- 3.3.2 Melatih pengawas sekolah dan guru utama dalam mengevaluasi kinerja sekolah dan guru, dengan fokus pada Praktik Pengajaran, Kurikulum dan Asesmen Berbasis Kelas. Pelatihan ini akan dilakukan bersama Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT-INOVASI, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3.3.3 Membangun kapasitas pejabat pendidikan kabupaten/kota, pejabat Kemenag, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dalam penelitian dan praktik berbasis bukti.
- 3.3.4 Memperkuat penelitian dan praktik berbasis bukti dengan menyelenggarakan konferensi pendidikan dan lokakarya untuk berbagi pengalaman serta praktik terbaik.

⁹⁵ Kemendikbudristek (2023). Praktik Baik Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Rapor Pendidikan 2022. <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/15994741016601-Praktik-Baik-Kepala-Sekolah-Dalam-Mengimplementasikan-Rapor-Pendidikan-2022>

⁹⁶ Berdasarkan gagasan “perencanaan berbasis data” yang dipromosikan oleh Kemendikbudristek.

Hasil 4: Perlindungan Anak



Anak-anak di Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk **kekerasan, marginalisasi, risiko lingkungan, dan bencana alam**. Laporan **Survei Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2018** mengungkapkan bahwa **62% anak mengalami kekerasan** pada suatu titik dalam hidup mereka. Bentuk kekerasan ini termasuk **kekerasan seksual dan emosional**, yang sering kali dilakukan oleh **orang-orang terdekat atau guru melalui metode disiplin yang keras**.⁹⁷ Hasil **kunjungan lapangan diagnostik di kabupaten/kota sasaran** juga menunjukkan **banyaknya kasus kekerasan terhadap anak**, termasuk kekerasan seksual, fisik dan psikologis. Selain itu, anak-anak sering kali menghadapi **agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah**.⁹⁸ **Lingkungan sekolah juga kerap kali tidak aman dan tidak mencerminkan tempat belajar yang kondusif bagi anak-anak**.

Anak-anak dengan **kebutuhan khusus** mengalami **marginalisasi dalam berbagai aspek**, terutama dalam **mengakses pendidikan**. Mereka membutuhkan **dukungan untuk mengatasi stigma, perlindungan, dan akses yang setara terhadap pendidikan**.

Di Indonesia:

- **Hampir 30% anak penyandang disabilitas tidak memiliki akses ke pendidikan, dan**
- **Banyak dari mereka yang bersekolah tetap tidak mendapatkan layanan yang memadai.**⁹⁹

Anak-anak dengan kebutuhan khusus sering kali **dikirim ke Sekolah Luar Biasa (SLB)** daripada **diintegrasikan ke sekolah umum**. Padahal, meskipun SLB dirancang untuk mendukung berbagai

⁹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 'KPPPA luncurkan hasil survei nasional tentang pengalaman anak dan remaja dalam tindak kekerasan terhadap anak (SNPHAR) tahun 2018', Jakarta, 2019. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>

⁹⁸ Know Violence in Childhood, Ending Violence in Childhood: Global Report 2017, Know Violence in Childhood, New Delhi, India, 2017. <https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Global-Report-2017.pdf>

⁹⁹ Bank Dunia. "How Indonesia is Including Students with Disabilities in School in Rural Indonesia". World Bank Group February 2024. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2024/02/08/how-indonesia-is-including-students-with-disabilities-in-school-in-rural-indonesia#:~:text=In%20Indonesia%2C%20almost%2030%20percent,has%20a%20way%20to%20go>

spektrum disabilitas, anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk belajar dan berkembang bersama teman-teman mereka di sekolah umum. Oleh karena itu, sekolah wajib mengizinkan anak-anak penyandang disabilitas untuk mendaftar di sekolah umum selama periode pendaftaran siswa baru. Perlindungan anak bagi anak penyandang disabilitas harus dimulai dengan peningkatan kesadaran akan hak-hak dasar mereka serta akses terhadap alat dan sumber daya yang mereka perlukan untuk berkembang di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan anak juga harus mencakup perlindungan dari bahaya fisik dan emosional akibat bencana lingkungan. Kemendikbudristek telah membentuk Sekretariat Sekolah Aman serta berbagai struktur dan program untuk mempromosikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan ketahanan terhadap perubahan iklim di tingkat sekolah. Namun, di lapangan, pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai pentingnya mengintegrasikan perubahan iklim dalam mekanisme perlindungan anak. Hal ini sangat penting untuk mengurangi gangguan belajar akibat bencana iklim serta mencegah anak putus sekolah dan kehilangan hak belajar.

Keluaran 4.1: Mengoperasionalkan Regulasi Nasional tentang Perlindungan Anak, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Sekolah (praktik)

Menghadapi tingginya angka kekerasan terhadap anak, Kemendikbudristek dan Kemenag berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, khususnya dalam menangani perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah.

Kedua kementerian ini telah menerbitkan peraturan menteri yang mengatur pencegahan dan penanganan perundungan serta kekerasan, termasuk kekerasan seksual di lingkungan sekolah.¹⁰⁰ Upaya untuk mengoperasionalkan peraturan menteri ini dilakukan melalui pengembangan regulasi di tingkat kabupaten/kota, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat kabupaten dan sekolah (Kemendikbudristek) dan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) (Kemenag).¹⁰¹

Tim tingkat kabupaten terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

- Dinas Perlindungan Anak dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA),
- Dinas Sosial, serta
- Pihak terkait lainnya.

¹⁰⁰ Permendikbudristek No. 46/2023 tentang “Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Sekolah” & Permenag No. 73/2022 tentang “Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag”.

¹⁰¹ Ibid.

Sementara itu, tim di tingkat sekolah terdiri dari:

- **Komite sekolah**, dan
- **Pemerintah desa atau tokoh masyarakat**.

Selain itu, **Rapor Pendidikan Kemendikbudristek** memiliki **Survei Lingkungan Belajar**, yang mencakup indikator:

1. **Iklm Keamanan Sekolah**,
2. **Iklm Kesetaraan Gender**, dan
3. **Iklm Keberagaman**.

Indikator-indikator ini digunakan untuk **memantau pencapaian sekolah dan daerah dalam menerapkan perlindungan anak**.

Lebih lanjut, **KemenPPPA** memiliki **standar sekolah ramah anak**, yang didasarkan pada **Konvensi Hak Anak** dan bertujuan tidak hanya untuk **memberdayakan peserta didik**, tetapi juga **melindungi mereka dari kekerasan**, baik yang dilakukan oleh **orang dewasa maupun teman sebaya**.

Meskipun strategi untuk **menangani kekerasan anak telah diterapkan**, tingkat **kesadaran dan implementasi aktif regulasi ini masih beragam** di antara pemangku kepentingan pendidikan. Dalam laporan diagnostik, beberapa langkah telah diterapkan di sekolah, seperti: (1) **Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)**, (2) **Pengawasan guru selama jam istirahat**, (3) **Kampanye anti-perundungan**, dan (4) **Komunikasi aktif dengan orang tua**.

Namun, masih terdapat tantangan besar dalam (1) **Mengintegrasikan perlindungan anak dalam kurikulum dan pengembangan profesional guru**, (2) **Menegakkan peraturan yang ada**, serta (3) **Menindaklanjuti pelanggaran terhadap regulasi perlindungan anak, kode etik, dan kebijakan perlindungan anak di sekolah**. Secara keseluruhan, penerjemahan regulasi ke dalam lingkungan sekolah yang benar-benar ramah anak masih berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis melalui kombinasi pendidikan dan penegakan aturan, yang didukung oleh layanan rujukan ke lembaga terkait di komunitas setempat.

Melalui keluaran ini, program akan mendukung:

- 4.1.1 Mengaktifkan, melatih, dan memantau upaya perlindungan anak di tingkat sekolah untuk pencegahan serta penanganan kekerasan di sekolah, sesuai dengan regulasi dan pedoman dari Kemendikbudristek dan Kemenag, melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat kabupaten dan sekolah.
- 4.1.2 Pelatih anggota TPPK dan Satgas PPKS dalam perlindungan anak dari kekerasan, termasuk: (1) Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, (2) Langkah mitigasi, (3) Manajemen kasus, serta (4) Tindakan korektif terhadap pelanggaran, sesuai dengan pedoman dari Kemendikbudristek dan Kemenag.

4.1.3 Meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah melalui kampanye yang melibatkan: guru, orang tua, tokoh masyarakat, pemuka agama serta pemangku kepentingan lainnya.

Keluaran 4.2: Memperkuat Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Melalui Pendekatan Terintegrasi di Sekolah, Rumah, dan Masyarakat (praktik)

Save the Children memiliki pengalaman panjang dalam menangani perlindungan anak di Indonesia. Salah satu program unggulan, **Disiplin Positif**, merupakan **program berbasis sekolah yang menggabungkan penelitian tentang perkembangan anak, metode pengajaran efektif, dan prinsip hak anak**. Dengan menggabungkan prinsip pedagogi dan hak anak, program ini membantu guru untuk:

- Mengenal perbedaan individu siswa,
- Memahami perkembangan anak,
- Memberikan kehangatan dan kepedulian,
- Menciptakan struktur yang aman di sekolah, serta
- Menetapkan tujuan jangka panjang bagi anak-anak.

Pendekatan ini dapat diterapkan dalam setiap tahap kehidupan anak, **mulai dari PAUD hingga pendidikan dasar awal dan lanjutan**. Save the Children telah memilotkan program ini dengan guru-guru di Indonesia dan akan terus mengembangkan serta memperbarui program ini, termasuk dalam mengoperasionalkan regulasi nasional terkait anti-perundungan dan kekerasan.

Melalui program **Safe Families**, Save the Children meningkatkan **kesadaran guru, orang tua, dan pengasuh** tentang pentingnya **perkembangan anak, hak-hak anak**, serta **pengasuhan positif**. Mereka diajarkan bagaimana membangun **hubungan yang kuat dengan anak-anak**, berdasarkan prinsip **tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, dan kesetaraan gender**. Di sisi lain, **anak-anak diberdayakan** untuk menyuarakan pendapat dan perasaan mereka di rumah, serta mencari bantuan jika mereka merasa tidak aman.¹⁰² Para **guru, orang tua, dan anak-anak telah melaporkan perubahan perilaku yang positif sebagai hasil dari program ini**.

Di Indonesia, program ini **dijalankan sebagai pilot di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur**. Mengingat masih **maraknya hukuman fisik di sekolah**, program ini menggunakan **pendekatan gabungan antara pendidikan dan perlindungan anak**, dengan fokus pada:

- **Pembelajaran yang menyenangkan**, serta
- **Bahan bacaan sebagai media eksplorasi sembilan area tematik terkait perlindungan anak**.

Melalui keluaran ini, program akan mendukung:

¹⁰² Save the Children (2023). Parenting Without Violence: Fathers and Mothers Tell the Impact of Positive Parenting. <https://somalia.savethechildren.net/news/parenting-without-violence-fathers-and-mothers-tell-impact-positive-parenting>

- 4.2.1 Meningkatkan kapasitas guru dan anggota TPPK mengenai Disiplin Positif di kabupaten terpilih, serta berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk mengevaluasi dampak program guna potensi adopsi di tingkat nasional.
- 4.2.2 Mengimplementasikan program Safe Families di kabupaten terpilih, serta mengevaluasi dampaknya bersama Kemendikbudristek dan Kemenag guna potensi adopsi di tingkat nasional. Program ini akan dijalankan melalui Training of Trainers (ToT) bagi fasilitator kabupaten, pelatihan bagi anggota TPPK, serta sesi pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh.

Perlindungan anak harus **melampaui sekolah dan rumah**, dengan melibatkan **komunitas secara langsung**. Save the Children memiliki pengalaman dalam **membangun program perlindungan anak berbasis masyarakat (Community-Based Integrated Child Protection Program / PATBM)**. Melalui PATBM, sebuah **komite perlindungan anak akan dibentuk** di tingkat desa yang terdiri dari: **Guru, Kepala sekolah, Tokoh masyarakat, serta Pemuka agama**.

Komite PATBM bertugas untuk:

- **Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu perlindungan anak,**
- **Membentuk sistem deteksi dini kekerasan anak** di sekolah dan masyarakat,
- **Berkoordinasi dengan sekolah dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak,** serta
- **Menyediakan mekanisme rujukan bagi anak-anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan yang tepat.**

Para anggota PATBM akan mendapatkan pelatihan tentang:

- **Hak-hak anak,**
- **Cara membentuk sistem rujukan untuk anak korban kekerasan,** serta
- **Bagaimana menghubungkan program dengan Parenting tanpa Kekerasan (Parenting without Violence Program).**

Program ini juga akan **membangun hubungan antara PATBM dengan pemerintah kabupaten/kota serta sekolah**, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Save the Children telah **mengimplementasikan PATBM dengan sukses di Kabupaten Kupang**.

Sehingga, melalui keluaran ini, program juga akan mendukung:

- 4.2.3 Mengaktifkan Program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (Community-Based Child Protection / CBCP) di tingkat desa, dengan fokus pada inklusi anak penyandang disabilitas. Mengevaluasi dampak program, serta berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk mempertimbangkan potensi adopsi program di tingkat nasional, melalui: lokakarya, pertemuan, dan upaya advokasi.

Keluaran 4.3: Mempromosikan Penguatan Sistem Perlindungan Anak di Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional (kebijakan)

Seperti yang telah dibahas dalam komponen sebelumnya, **implementasi kebijakan nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih menghadapi tantangan yang berkelanjutan**. Sebaliknya, **pengalaman dari tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota) juga perlu dibagikan ke tingkat nasional**, sehingga dapat memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan berbasis bukti dan kebutuhan di lapangan.

Melalui keluaran ini, program akan mendukung:

- 4.3.1 Mengadvokasi adopsi dan implementasi regulasi daerah terkait perlindungan anak, melalui: (1) Pertemuan tentang pedoman administratif dan teknis, (2) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP), (3) Integrasi perlindungan anak dalam rencana kerja pendidikan daerah, serta (4) Pengalokasian anggaran daerah untuk perlindungan anak. Pendekatan ini mencakup advokasi terhadap kebijakan perlindungan anak yang relevan, termasuk: (a) Regulasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Kemendikbudristek, (b) Regulasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Kemenag, (c) Operasionalisasi sistem rujukan bagi anak korban kekerasan, (d) Standar Sekolah Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), (e) Profil Belajar Siswa (PBS) Kemendikbudristek-Kemenag untuk mendukung anak penyandang disabilitas, serta (f) Program Sekolah Aman Kemendikbudristek untuk pengurangan risiko bencana.
- 4.3.2 Membagikan adaptasi kebijakan perlindungan anak dari tingkat lokal ke tingkat nasional, melalui: (1) Berbagi praktik terbaik dan penelitian dalam forum pendidikan dan perlindungan anak di tingkat nasional, serta (2) Mempromosikan pembelajaran lintas daerah untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.

Aturan Pelaksanaan

Save the Children akan memimpin pengelolaan konsorsium ini, dengan Save the Children Australia (SCA) bertindak sebagai titik fokus komunikasi, pelaporan, dan kepatuhan hukum untuk GPE, sementara Save the Children Indonesia (SCIDN) akan memimpin operasi di tingkat nasional. SCIDN akan mengelola badan kepemimpinan, yaitu **Program Management Unit (PMU)**, serta mengawasi perjanjian kontraktual dengan mitra pelaksana sesuai kebutuhan. PMU, yang dipimpin oleh **Chief of Party** dan terdiri dari staf program penuh waktu serta pemangku kepentingan teknis untuk setiap hasil program, akan mengelola operasi harian secara keseluruhan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan di semua kabupaten.

PMU juga akan mendapatkan manfaat dari arahan strategis serta keselarasan dengan INOVASI melalui masukan teknis dari **National Steering Committee dan Technical Working Group**. Hal ini akan memperkuat peran kabupaten dalam mengidentifikasi masalah dan solusi, memberikan pedoman standar bagi sekolah untuk berpotensi memperluas skala intervensi, memastikan koordinasi serta komplementaritas dengan program lain, serta menjamin bahwa pembelajaran dari program ini dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan kerangka kerja

pendidikan nasional. Selain itu, PMU akan berkoordinasi dan memberikan laporan kepada **MPI/LEG**, sehingga program ini dapat terintegrasi dalam arsitektur bantuan pendidikan yang lebih luas guna memastikan efektivitas bantuan yang optimal. Koordinasi yang efektif antara SCIDN dan SCA, serta dengan DFAT dan INOVASI, akan menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

Kabupaten akan menjalankan kegiatan yang telah dirancang sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan melibatkan perwakilan dari setiap kabupaten dalam PMU, serta dukungan dari **Kemendikbudristek, Kemenag, dan MPI/LEG**, para pemangku kepentingan akan mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai cakupan program, kegiatan di kabupaten lain, serta kegiatan INOVASI. Hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap tim proyek dapat belajar dari pengalaman kabupaten lain tanpa melakukan duplikasi atau mengganggu intervensi program lainnya. Save the Children berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh setiap kabupaten bersifat **lokal dan berbasis kebutuhan daerah**, serta memungkinkan kabupaten untuk mendapatkan manfaat secara langsung dari pencapaian dan pelajaran yang diperoleh dari kabupaten lain.

Di tingkat lokal, Save the Children akan membentuk **komite pengarah provinsi** dengan perwakilan dari **Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)** guna memberikan arahan strategis serta memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan program. Selain itu, konsorsium pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten akan dibentuk untuk memberikan rekomendasi terkait implementasi program. Peran dan tanggung jawab dari semua mitra dalam program ini secara rinci disajikan dalam **Tabel 5**.

Tabel 5: Peran dan Tanggung Jawab Mitra Utama di Tingkat Nasional

Mitra Kunci	Peran dan Tanggung Jawab
Save the Children Indonesia / SC IDN (Agen Pelaksana Hibah)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan program di provinsi dan kabupaten/kota sasaran. • Merekrut staf program dan/atau mitra eksternal untuk dukungan teknis dan kemitraan. • Menyusun kerangka acuan kerja (ToR) untuk Program Management Unit (PMU) serta merekrut personel untuk peran di dalamnya. • Mengelola PMU secara tidak langsung melalui garis koordinasi (dotted line management). • Menerima dana dari Save the Children Australia untuk dikelola oleh PMU. • Melakukan kontrol kualitas pertama terhadap laporan teknis dan keuangan yang diterima dari PMU. • Mengoordinasikan (melalui PMU) pengajuan laporan kepada Save the Children Australia terkait komunikasi dengan donor, kepatuhan, dan aspek administratif lainnya.

**SC Australia / SCA
(Agen Koordinasi Hibah, entitas
hukum yang berhubungan
dengan GPE)**

- Memastikan pengendalian kualitas secara menyeluruh serta menyetujui dan mengajukan laporan resmi kepada GPE.
- Mengajukan laporan teknis dan keuangan triwulanan serta dokumen lain yang diperlukan kepada GPE.
- Berkomunikasi dengan Sekretariat GPE terkait berbagai aspek manajemen program, seperti perubahan besar dalam kemitraan konsorsium, intervensi program, output dan outcome, realokasi anggaran, serta perpanjangan program.
- Menunjuk lembaga independen untuk melakukan audit eksternal program.

**Program Management Unit
(PMU) dalam SCIDN**

- Chief of Party
- Deputy Chief of Party
- Head of Operations
- Head of Learning, Impact, Ecosystem and Policy
- Planning & Reporting Advisor
- Regional Managers - Field
- Finance Manager
- Advocacy, Communications & Campaign Manager
- Education Advisor
- Child Protection Advisor
- District Coordinators
- Logistic and Supply Chain Coordinator
- Communications Coordinator
- Pilot & Innovation Specialist
- Ecosystem Convener Specialist
- Award Specialist
- Advocacy & Campaign Specialist
- Policy Specialist
- REALM/MEAL Advisor
- Logistics Officers - Lapangan
- Finance Officers - Lapangan
- Child Protection Officers - Lapangan
- Education Officers - Lapangan
- MEAL Officers - Lapangan

- Mengelola program secara harian sesuai dengan regulasi BAPPENAS, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, dan KemenPPPA, serta kebijakan Save the Children dan GPE.
- Memberikan arahan terkait pelaksanaan program, pengelolaan keuangan termasuk penyaluran dana dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan teknis, pemantauan, serta pelaporan.
- Memastikan pedoman teknis Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek dan Kemenag diterapkan secara konsisten di seluruh provinsi dan kabupaten.
- Mengumpulkan dan menyusun laporan kabupaten menjadi laporan program triwulanan dan tahunan.
- Menyiapkan dan mengajukan dokumen pengajuan dana serta menyusun laporan keuangan triwulanan dan tahunan berdasarkan laporan mitra.
- Mengoordinasikan audit eksternal tahunan.
- Memastikan pengendalian kualitas dan pembelajaran sistematis program melalui pertemuan teknis triwulanan, kunjungan lapangan, serta pemantauan bersama dengan DFAT (sebagai co-financier Multiplier) dan INOVASI.
- Berkontribusi dalam penyediaan data program yang relevan untuk pemerintah daerah (Kemendagri, Kemendikbudristek, dan Kemenag).
- Menghasilkan, menerjemahkan, dan menyebarluaskan manajemen pengetahuan, termasuk hasil pembelajaran dan riset program.
- Menyediakan laporan program dan keuangan triwulanan kepada National Steering Committee untuk ditinjau dan diberi masukan.
- Mengadvokasi pencapaian program, pelajaran yang dipetik, serta praktik baik kepada Save the Children, Program Steering Committee, INOVASI, dan MPI.

**Komite Pengarah Nasional
(National Steering Committee)**

- Diketahui bersama oleh Kemendikbudristek dan Kemenag dengan anggota potensial termasuk BAPPENAS, Kemendagri, dan Save the Children.
- Mengawasi, mengarahkan, dan mendukung kemajuan strategis program dalam mencapai output dan outcome yang diharapkan secara triwulanan.
- Meninjau dan menyetujui anggaran tahunan dan rencana kerja program.

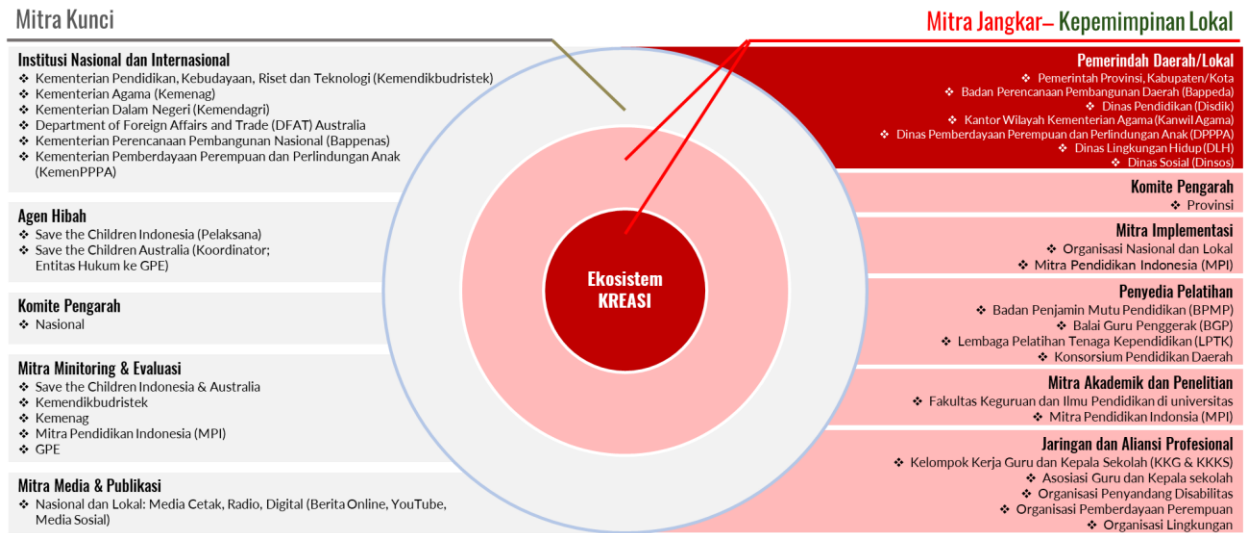
	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan koordinasi yang berkelanjutan dengan GPE Multiplier Co-Financier (DFAT), INOVASI, GPE Partnership Compact, dan SCG Grant Agent (UNICEF) untuk mencapai target program secara menyeluruh. • Memobilisasi dan mencari pendanaan tambahan untuk kegiatan pendidikan di Indonesia. • Melibatkan pejabat pemerintah pusat dalam kunjungan lapangan guna memahami implementasi kebijakan, nilai tambahnya, serta keterbatasannya.
Peran Kementerian terkait (Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan teknis dan operasional terkait kegiatan program, terutama yang selaras dengan reformasi Merdeka Belajar. • Mengoordinasikan dan mengimplementasikan kegiatan program bersama Save the Children dan mitra di kabupaten dan sekolah sasaran. • Memastikan kegiatan program selaras dengan kebijakan dan program yang telah ada di bawah Kemendikbudristek, Kemenag, DFAT, atau donor lainnya.
Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group) – SCIDN, Tim KREASI, DFAT, dan INOVASI	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas dan memastikan keselarasan strategis dan teknis antara KREASI dan INOVASI dalam mendukung Merdeka Belajar. • Menjelajahi peluang kolaborasi dalam riset untuk memperkuat bukti dalam pendekatan program. • Mengembangkan respons koordinatif terhadap tantangan yang diidentifikasi dalam kedua program, seperti alat asesmen kelas 2 dan sistem pengukuran.
Mitra Pendidikan Indonesia (MPI)/ Local Education Group (LEG)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung perencanaan sektor pendidikan, pengembangan kebijakan, implementasi, dan pemantauan melalui tinjauan sektor bersama, misi dukungan, dll. • Menjamin akuntabilitas dengan mengonfirmasi keabsahan laporan program kepada GPE berdasarkan hasil pemantauan program.

Susunan Pelaksanaan Tingkat Kabupaten

Sebagai bagian dari **model ekosistem pendidikan**, Save the Children akan berperan sebagai fasilitator dan perantara dalam **pengaturan implementasi di tingkat lokal**. Institusi pendidikan lokal serta aktor di tingkat kabupaten dan provinsi akan terus menjalin hubungan dengan mitra utama di tingkat nasional maupun internasional sejauh memungkinkan.

Namun demikian, pemangku kepentingan pendidikan di tingkat lokal dapat mencakup **pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO), serikat guru, akademisi dan lembaga penelitian, organisasi media, serta komunitas**. Dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dalam satu platform, program ini memastikan **pendekatan kolaboratif yang dipimpin oleh kabupaten** serta menciptakan **peluang lebih besar bagi keberlanjutan program** (Lihat **Gambar 7**).

Figure 7: Ekosistem Kabupaten – Mitra Utama dan Pendukung



Mitra utama adalah mitra lokal yang berperan penting dalam **pelaksanaan dan operasional program** guna mencapai tujuan dan hasil program secara keseluruhan. KREASI akan menggunakan **mitra pelaksana lokal** untuk mendukung pekerjaan di tingkat kabupaten, sementara **Koordinator Kabupaten dan Manajer Regional** akan berperan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengadakan diskusi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Mitra utama memiliki **peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam program (lihat Tabel 6)**. Fungsi mereka akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi keberhasilan program.

- **Pemerintah daerah** akan meningkatkan lingkungan regulasi untuk mendukung reformasi pendidikan nasional, mengakui serta meningkatkan kesadaran tentang reformasi tersebut, dan menyediakan ruang uji coba untuk pendekatan baru.
- **Penyedia pelatihan** akan memberikan **bantuan teknis dan penguatan kapasitas** untuk meningkatkan **akses pendidikan dan hasil belajar**, serta mengintegrasikan **prinsip GEDSI, kesejahteraan anak, dan adaptasi perubahan iklim** dalam kegiatan mereka.
- **Bantuan teknis (technical assistance)** merupakan aspek utama dalam INOVASI, dan penguatan kapasitas bertujuan untuk memastikan **perubahan transformatif dan keberlanjutan intervensi program**.
- **Perhatian khusus** akan diberikan pada **pilot dan uji coba adaptasi lokal reformasi Merdeka Belajar (MB)**, yang akan **memberdayakan pemangku kepentingan lokal** untuk mengidentifikasi masalah pendidikan dan menciptakan solusi yang sesuai dengan konteks masing-masing daerah.

Mitra akademik dan pengelolaan pengetahuan dapat **memperkuat pencapaian program** dengan meningkatkan pembelajaran, kolaborasi, dan replikasi praktik-praktik yang menjanjikan.

Asosiasi profesional dan organisasi masyarakat sipil dapat mewakili kepentingan konstituen mereka serta mengurangi hambatan biaya langsung, tidak langsung, dan peluang, seperti norma sosial yang membatasi akses pendidikan atau pekerja anak, serta berkontribusi terhadap jaringan perlindungan sosial bagi anak-anak dan keluarganya. Sektor swasta akan tetap menjadi bagian dari rantai nilai tenaga kerja serta berkontribusi dalam kebutuhan keterampilan kerja untuk pasar lokal dan global, dengan potensi kontribusi finansial. Kontribusi Multiplier dalam membangun konsorsium pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten memungkinkan seluruh komunitas mitra utama berkumpul sebagai satu wadah pemangku kepentingan pendidikan. Dengan dukungan dari Kemendikbudristek, konsep ini akan diamati secara cermat untuk kemungkinan replikasi di daerah lain.

Dari Maret hingga Juni 2024, Save the Children mulai mengidentifikasi pemangku kepentingan pendidikan utama yang memiliki keahlian dan kapasitas beragam untuk terlibat sebagai mitra ekosistem pendidikan lokal dalam program KREASI. Mitra-mitra ini akan berperan aktif dalam:

- Meningkatkan dukungan tingkat kabupaten terhadap program, serta
- Memastikan bahwa kegiatan program sesuai dengan prioritas daerah dan tujuan pendidikan masing-masing wilayah.

Beberapa mitra utama akan memiliki hubungan kontraktual dalam program ini. Mitra kontraktual akan dipilih berdasarkan asesmen kapasitas dan harus melalui proses pengadaan yang sesuai dengan kebijakan Save the Children.

Table 6: Anchor Partners' Roles and Responsibilities

Mitra Utama	Detail Entitas Mitra	Peran dan Tanggung Jawab
<i>Convener</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Save the Children Indonesia 	Mengelola dan mengoordinasikan pemangku kepentingan pendidikan guna memastikan kolaborasi serta menciptakan kondisi untuk keberlanjutan program.
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota • Dinas Pendidikan Daerah • Kantor Wilayah Kemenag • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Sosial 	Berkolaborasi dengan mitra ekosistem untuk mengontekstualisasikan, merancang, dan menyelaraskan regulasi nasional dengan kebijakan atau inisiatif politik baru atau yang telah ada. Selanjutnya, memastikan implementasi lebih lanjut terhadap regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Komite Pengarah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat pemerintah • Pemangku kepentingan ekosistem di tingkat kabupaten dan provinsi (akan ditentukan lebih lanjut) 	Diketuai bersama oleh lembaga pemerintah yang akan ditentukan (misalnya Wakil Gubernur atau Wakil Bupati) untuk mengawasi, mengarahkan, dan mendukung kemajuan implementasi program sesuai dengan output dan outcome yang diharapkan secara triwulanan.

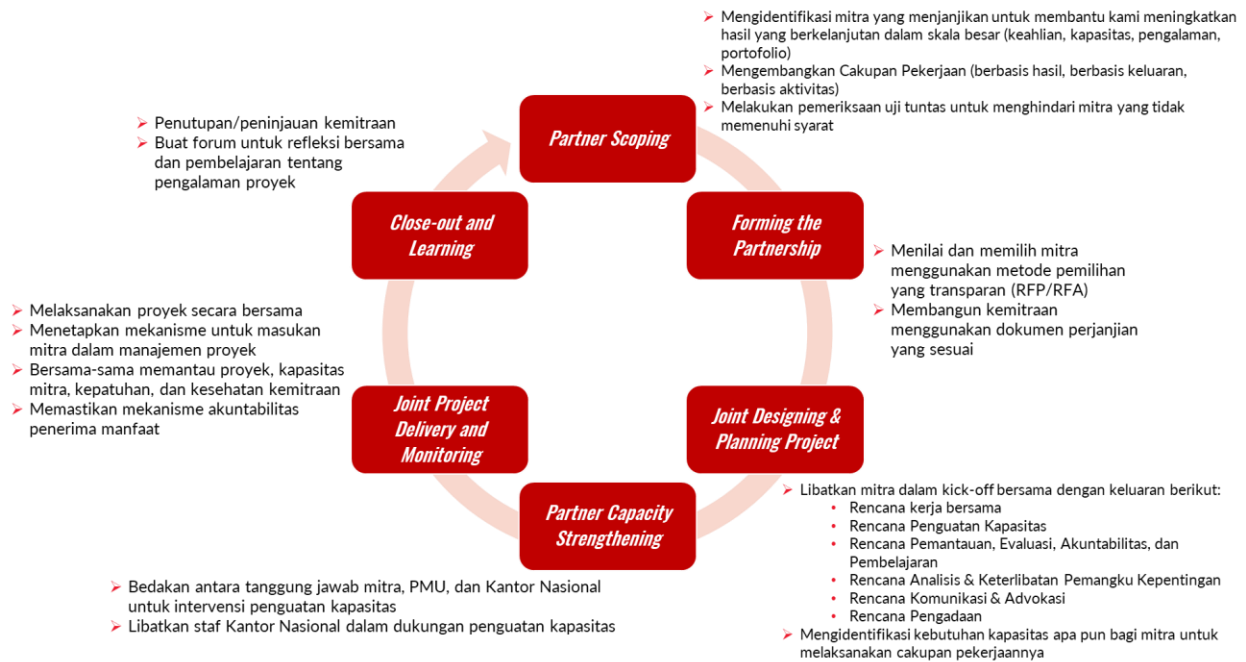
Meninjau dan menyetujui anggaran serta rencana tahunan program.

Memobilisasi dan mencari pendanaan tambahan untuk kegiatan pendidikan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Melibatkan pejabat pemerintah daerah, provinsi, dan nasional dalam kunjungan lapangan untuk memahami implementasi kebijakan, nilai tambahnya, serta keterbatasannya.

Penyedia Pelatihan	<ul style="list-style-type: none">Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)Balai Guru Penggerak (BGP)Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)Konsorsium Pendidikan Daerah	Menyediakan bantuan teknis dan penguatan kapasitas dalam berbagai komponen program, seperti kurikulum dan asesmen, praktik mengajar, kepemimpinan pendidikan, perlindungan anak, serta isu lintas sektor seperti GEDSI dan perubahan iklim .
Pengelolaan Pengetahuan, Riset, dan Akademisi	<ul style="list-style-type: none">Lembaga Pendidikan Guru, Perguruan Tinggi, dan Universitas	Memfasilitasi berbagi pengetahuan dan pembelajaran untuk pencapaian program bersama mitra ekosistem. Memberikan masukan dan rekomendasi dalam perancangan serta implementasi program jika diperlukan.
Asosiasi Profesional, termasuk Kelompok Anak dan Pemuda	<ul style="list-style-type: none">Kelompok Kerja Guru (KKG)Organisasi Penyandang DisabilitasOrganisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuanOrganisasi lingkungan hidup	Mengadvokasi kepentingan pemangku kepentingan pendidikan dan penerima manfaat program, termasuk kelompok yang paling terpinggirkan dan kurang terlayani. Membantu dalam elemen perlindungan sosial , seperti akses terhadap program perlindungan sosial serta mengurangi kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak .
Sektor Swasta	<ul style="list-style-type: none">Beragam, akan ditentukan berdasarkan konteks kabupaten masing-masing	Berkontribusi dalam bentuk dukungan finansial, barang, dan teknis , jika relevan. Membantu membentuk program yang berorientasi pada keterampilan kerja dan menjamin pendanaan berkelanjutan .
Media	<ul style="list-style-type: none">Media cetak, radio, dan media digital lokal	Mendukung komunikasi eksternal dengan memanfaatkan platform yang telah mapan untuk menyebarkan informasi dan dampak program.

Gambar 8: Siklus Manajemen Kemitraan KREASI



Prinsip

Pendekatan jangka panjang **Save the Children** dalam bekerja secara lokal bersama komunitas di tingkat kabupaten—dengan menyediakan solusi yang fleksibel, mengumpulkan umpan balik, dan menyesuaikan strategi secara iteratif—sejalan dengan prinsip-prinsip utama **INOVASI**, yang menekankan pendekatan **kolaboratif dan berbasis kepemimpinan lokal**. Dengan prinsip **inklusi**, **KREASI** akan **secara aktif melibatkan dan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan**, baik secara horizontal maupun vertikal, mulai dari siswa dan orang tua, guru dan kepala sekolah/madrasah, pejabat pendidikan kabupaten, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya. Guru dan pemimpin pendidikan, khususnya, akan mendapatkan **pengembangan profesional secara berkelanjutan** untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman serta mendorong penerimaan atas keberagaman di dalam kelas dan komunitas sekolah/madrasah. Wilayah sasaran **KREASI** telah dipilih dengan cermat, **berfokus pada kelompok yang paling terpinggirkan dan kurang terlayani**, termasuk mereka yang tinggal di **daerah 3T** (terdepan, terluar, tertinggal). Sejalan dengan **INOVASI**, program **KREASI** akan menggunakan pendekatan **Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA)** dan **Thinking and Working Politically (TWP)**, yang menjadi inti dari pendekatan program ini. Terakhir, **KREASI** akan **bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal dan nasional untuk menghasilkan bukti yang andal serta mendorong penggunaannya**, tidak hanya untuk menyesuaikan implementasi program, tetapi juga untuk mendukung **Kemendikbudristek dan Kemenag dalam mengembangkan reformasi Merdeka Belajar secara berkelanjutan**.

Kesiapan Program

KREASI secara utama selaras dengan INOVASI, sebuah pendekatan yang telah dikembangkan secara menyeluruh dan dipahami dengan baik di Indonesia. Save the Children akan **mempertahankan parameter utama dari INOVASI**, yaitu **literasi dan numerasi dasar** serta **penguatan karakter bagi siswa prasekolah dan sekolah dasar kelas 1-3**, dengan penekanan pada dukungan terhadap prioritas Merdeka Belajar (MB) Kemendikbudristek dalam kurikulum, asesmen, praktik mengajar, dan kepemimpinan pendidikan. KREASI juga akan terus mengarusutamakan prinsip kesetaraan dalam program, dengan fokus pada **gender, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak dari latar belakang kurang mampu, serta aspek inklusi sosial yang lebih luas, termasuk penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran**. Selain itu, KREASI akan menambahkan komponen tentang **perubahan iklim dalam pendidikan**, yang sejalan dengan pendanaan INOVASI Fase 3, serta menambahkan komponen perlindungan anak, yang memanfaatkan keunggulan kelembagaan Save the Children dalam isu ini.

KREASI akan bekerja sama secara erat dengan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk memastikan bahwa semua **komponen program tidak hanya selaras dengan intervensi MB pemerintah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembelajaran sistemik** untuk memperkuat implementasi MB. KREASI akan memanfaatkan kebijakan dan pedoman yang telah dikembangkan oleh INOVASI, mengingat mereka telah memasuki tahap ketiga pendanaan. Dalam beberapa kasus di mana kebijakan dan pedoman INOVASI dibuat sebelum lahirnya MB, KREASI akan berkonsultasi dengan **Kemendikbudristek** untuk menentukan langkah terbaik ke depan. Sebagai contoh, dalam hal hasil belajar siswa, KREASI akan bekerja sama dengan Kelompok Kerja Teknis untuk mengeksplorasi penggunaan alat asesmen hasil belajar awal (*early grade learning outcomes assessment tool*) dari PSPK atau INOVASI, guna memaksimalkan pembelajaran dari program. Rencana implementasi program ini disajikan dalam Lampiran C.

Pengelolaan Keuangan

KREASI akan memastikan bahwa **nilai uang (Value for Money/VFM)** tidak hanya dapat dibuktikan tetapi juga diwujudkan dalam seluruh pelaksanaan program. **Sistem manajemen keuangan Save the Children International (SCI)**, yang berlaku untuk semua program Save the Children, menerapkan **metodologi alokasi biaya yang adil** guna memastikan bahwa biaya bersama didistribusikan secara objektif di antara berbagai sumber pendanaan.

SCI memiliki **sistem manajemen keuangan yang kuat**, yang mampu **melacak pengeluaran proyek serta menghasilkan laporan manajemen dan keuangan** untuk menunjukkan pemanfaatan sumber daya keuangan secara **efektif dan efisien**, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh berbagai donor.

Dalam hal **alur pendanaan**, **Save the Children Australia (SCA)** akan menerima dana program dari **Global Partnership for Education (GPE)** dan kemudian mentransfer dana tersebut ke **Program Management Unit (PMU)** melalui **Save the Children Indonesia (SCIDN)**. Selanjutnya, **PMU** akan

mentransfer dana langsung kepada Mitra Pelaksana (*Implementing Partners*) yang telah dipilih melalui **proses pengadaan kompetitif**, sebagaimana dijelaskan dalam bagian pengadaan dan sesuai dengan perjanjian mitra. **Pemerintah nasional dan daerah** juga berhak menerima dana jika mereka terpilih dan berhasil dalam proses pengadaan kompetitif tersebut.

Transfer dana akan bergantung pada **perkiraan arus kas (*cash flow forecasts*) dan permintaan dana (*cash requests*) secara berkala**, sesuai dengan **rencana kerja tahunan dan anggaran mitra**. **Pertanggungjawaban atas pencairan dana (*acquittals for advances*) akan dilakukan setiap bulan** dan akan ditinjau oleh **PMU sebelum diserahkan ke SCI**. Semua mitra diwajibkan untuk **mencatat pengeluaran mereka dalam sistem akuntansi berbasis cloud** yang dikendalikan oleh SCI. Hal ini memungkinkan PMU untuk **memantau pengeluaran mitra secara real-time** dan memperlancar proses **pertanggungjawaban atas pencairan dana sebelumnya**.

Selain pencairan dana pertama, **semua pencairan dana berikutnya akan didasarkan pada keberhasilan pertanggungjawaban atas pencairan dana sebelumnya**.

Pada tingkat pengeluaran, **setiap biaya yang memenuhi syarat akan dilacak menggunakan kode anggaran unik**. **Kode anggaran ini akan digunakan untuk memantau pengeluaran melalui analisis anggaran bulanan versus realisasi (Budget Versus Actual/BVA)**.

Gambar 9: Alur Dana



Mitra dan subkontraktor diwajibkan untuk mengajukan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian mitra mereka kepada Program Management Unit (PMU). PMU akan menyusun laporan keuangan dan menyerahkannya kepada Save the Children Australia (SCA) untuk diteruskan kepada Global Partnership for Education (GPE). Tim Keuangan PMU akan melakukan verifikasi terhadap mitra konsorsium dan subkontraktor, serta memastikan bahwa mereka mematuhi semua standar hukum dan kepatuhan SCI, termasuk standar terkait pencegahan kecurangan (*fraud substandard*). Save the Children International (SCI) memiliki kebijakan nol toleransi terhadap kecurangan (*zero tolerance for fraud*).

Kebijakan Pencegahan Penipuan, Suap, dan Korupsi SCI memberikan panduan terperinci tentang prosedur pelaporan dugaan kecurangan melalui sistem DATIX SCI untuk dilakukan investigasi. SCI juga melakukan audit tahunan dan audit program secara berkala, dan hingga saat ini tidak pernah mengalami ketidaksesuaian kepatuhan (*non-compliance*). Pada akhir program, PMU akan mengoordinasikan audit akhir yang dilakukan oleh auditor eksternal yang disetujui oleh SCA.

Pengadaan

KREASI, melalui **Save the Children Indonesia (SCIDN)**, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa **kebijakan pengadaan selaras dengan standar internasional** dan memenuhi **persyaratan**

Global Partnership for Education (GPE). SCIDN telah menyesuaikan kebijakan pengadaannya dengan **Panduan Pengadaan Global SCI (SCI Global's Procurement Manual)**. Save the Children memiliki **tim pengadaan yang berfungsi penuh di Indonesia**, dengan dukungan dari tim pengadaan di tingkat **global dan regional**. SCIDN memiliki **pedoman terperinci mengenai batasan nilai pengadaan barang dan jasa**. Sebagai contoh, proses pengadaan yang menghasilkan **perjanjian kerangka kerja (framework agreement)** memerlukan prosedur khusus, yang mensyaratkan adanya **tanda terima atau penawaran harga**, serta jumlah minimum penawaran harga yang bergantung pada **batas nilai pengadaan** barang atau jasa terkait.

Untuk **barang atau jasa yang memerlukan penawaran harga formal**, sebuah **komite pengadaan** harus dibentuk guna menentukan proses pengadaan dan memutuskan pihak yang akan diberikan kontrak. Dalam **proses pengadaan kompetitif**, persyaratan telah ditetapkan untuk memastikan bahwa **tender bersifat terbuka dan kompetitif (lihat Tabel 7)**.

Tabel 7: Prosedur Pengadaan

Prosedur Pengadaan	Batas Nilai Keuangan	Persyaratan Penawaran
Kas & Tanda Terima (Cash & Receipt)	USD 0 - 100	Tidak ada
Penawaran Tunggal (Single Quotation)	USD 101 - 1,000	Minimal 1 penawaran
Penawaran Sederhana (Simple Quotation)	USD 1,001 - 10,000	Minimal 3 penawaran
Penawaran Formal (Formal Quotation)	USD 10,001 - 87,500	Minimal 3 penawaran (dalam amplop tersegel)
Tender	USD 87,501 +	Minimal 3 penawaran (dalam amplop tersegel)

Selama proses pengadaan kompetitif, **komite pengadaan akan memeriksa pemasok yang berminat**, termasuk **verifikasi pendaftaran usaha resmi** dan, jika diperlukan, melakukan kunjungan langsung untuk memastikan keberadaan fisik mereka. Meskipun bukan merupakan "pemasok," **lembaga pemerintah nasional dan daerah (termasuk pemerintah kabupaten)** berhak untuk berpartisipasi dalam proses lelang pengadaan. **Komite Pengadaan akan menilai vendor dari aspek keuangan, reputasi, perlindungan anak (safeguarding), serta kapasitas teknis**. Vendor potensial juga akan **disaring dan diverifikasi** sebagai bagian dari **proses uji tuntas (due diligence)** untuk memastikan bahwa mereka tidak termasuk dalam daftar sanksi ekonomi atau pembiayaan terorisme. **Vendor yang tercantum dalam daftar sanksi akan dikecualikan dari proses pengadaan**.

Kontrak akan diberikan berdasarkan prinsip nilai uang (*value for money*) dan rekam jejak kinerja sebelumnya, serta kriteria lainnya. Setelah kontrak diberikan, mitra akan melakukan **penilaian kinerja vendor setiap tahun**. Semua vendor harus **mematuhi kebijakan anti-suap**,

anti-penipuan, anti-korupsi, serta kebijakan perlindungan anak (*child safeguarding*). Selama masa efektif program (tiga bulan setelah penghargaan dana GPE), KREASI akan mengikuti prinsip dasar pengadaan, termasuk mengembangkan rencana pengadaan dan menetapkan jalur pasokan (*sourcing pipeline*).

Semua mitra pelaksana diwajibkan untuk membuat rencana pengadaan mereka sendiri selama periode program, memperbarui rencana pengadaan secara berkala, dan menyerahkan rencana tersebut kepada PMU. Rencana pengadaan akan mencakup pembelian barang/jasa dengan nilai lebih dari USD 50,000 dan juga akan mencakup jalur pasokan tahunan (*annual sourcing pipeline*) untuk kebutuhan program dan operasional. Jalur pasokan ini akan memaksimalkan nilai uang (*value for money*) dan mencegah keterlambatan dalam implementasi program. PMU akan meninjau rencana pengadaan, memastikan standarisasi biaya, serta berkonsultasi dengan INOVASI untuk membandingkan harga satuan dalam pengadaan berskala besar.

Research, Evaluation, Accountability, Learning and Monitoring (Penelitian, Evaluasi, Akuntabilitas, Pembelajaran, dan Moniroting)

Moniroting dan evaluasi dalam KREASI akan mengacu pada kerangka kerja **Research, Evaluation, Accountability, Learning, and Monitoring (REALM)** dari **Save the Children** guna memastikan bahwa intervensi program memiliki kualitas tinggi, terdapat proses pengumpulan data yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen program, serta mekanisme umpan balik iteratif untuk memperkuat hasil program. Kerangka kerja ini juga memastikan bahwa kegiatan program tetap berada di jalur yang benar dan mampu mengukur kontribusi terhadap hasil dan dampak program, serta mendokumentasikan **bagaimana perubahan terjadi**. Kerangka kerja REALM akan memberikan umpan balik terkait **kualitas dan relevansi intervensi** dalam mencapai hasil program yang diharapkan, serta menyediakan informasi untuk evaluasi, adaptasi, dan perbaikan. Penting untuk dicatat bahwa REALM akan **selaras dengan proses perencanaan berbasis data yang digunakan oleh Kemendikbudristek**. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program tetapi juga akan berkontribusi pada **dialog kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional**. Perencanaan berbasis data merupakan bagian dari sistem pemantauan kinerja pendidikan yang komprehensif, mencakup **dokumentasi, pembelajaran, dan evaluasi berbasis data** serta memberikan kesempatan untuk refleksi. **Sumber data Kemendikbudristek meliputi EMIS, Dapodik, Asesmen Nasional (AN), serta data dari BPS dan Simpatika**, yang akan digunakan sebagai data publik atau data yang tersedia untuk KREASI.

Kerangka hasil menjadi dasar bagi semua upaya REALM (lihat Lampiran D: Kerangka Hasil). Kerangka ini dikembangkan oleh **Save the Children sebagai Grant Agent**, bekerja sama dengan **PSPK sebagai GPE Coordinating Agency** serta berkonsultasi dengan **DFAT/INOVASI**. Indikator yang digunakan selaras dengan indikator **Merdeka Belajar**, dan Kelompok Kerja Teknis akan mengevaluasi kemungkinan penggunaan indikator yang sama untuk KREASI dan INOVASI setelah

program berjalan efektif. KREASI akan **mengumpulkan data, memverifikasi informasi melalui kunjungan lapangan, dan melaporkan perkembangan berdasarkan setiap indikator keluaran dan aktivitas**. Bergantung pada kebutuhan program dan ketersediaan alat, alat khusus akan dirancang untuk **memfasilitasi pengumpulan, analisis, dan pelaporan data**.

Kerangka hasil ini **responsif terhadap standar Gender and Age Marker (GAM) dari IASC** dan akan **ditinjau secara berkala** untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tujuan program. Rencana REALM serta prosedur dan alat pengumpulan data akan diperbarui selama **fase awal program** oleh Save the Children dan disesuaikan dengan kerangka hasil yang telah disepakati. Rencana ini akan **ditinjau secara berkala oleh PMU** untuk memastikan efektivitas dan relevansinya tetap terjaga. **PMU dan pemangku kepentingan lainnya akan melakukan sesi refleksi pembelajaran** guna memastikan praktik terbaik dapat dibagikan di antara penerima hibah dan anggota Local Education Group (LEG) di tingkat nasional serta melalui berbagai kelompok pendidikan lokal dan ekosistem distrik di wilayah implementasi.

Pengumpulan data akan mengandalkan:

1. **Sistem data yang telah ada** di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan organisasi.
2. **Data spesifik yang dikumpulkan melalui asesmen dan evaluasi**.
3. **Pelaporan individual dari mitra program**.

Untuk melengkapi inisiatif pengumpulan data yang telah ada, metode **pengumpulan data berbasis partisipasi dan berpusat pada anak** akan digunakan, termasuk **diskusi kelompok terarah (FGD), survei standar, dan wawancara informan kunci**.

Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala oleh mitra pelaksana melalui sistem internal mereka masing-masing. Para penerima hibah akan berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi berkala melalui berbagai metode berikut:

- **Studi dasar (baseline study)** akan dilakukan dalam **tiga bulan pertama** setelah program efektif untuk menyediakan data dasar bagi kerangka hasil program.
- **Pemantauan program secara berkelanjutan** akan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kemajuan dan tantangan, serta secara sistematis mengidentifikasi peluang perbaikan. Hasil pemantauan akan **menyebarkan praktik terbaik dan tantangan dari tingkat kabupaten ke tingkat nasional**. Proses ini juga akan mencakup **kunjungan pemantauan lapangan bersama mitra pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya**, termasuk **Kemendikbudristek, Kemenag, INOVASI, dan penerima manfaat**.
- **Pemantauan keuangan berkelanjutan** mencakup **audit tahunan** (sebanyak **empat kali**) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit eksternal. Selain itu, data pemanfaatan keuangan triwulanan akan dikirimkan melalui portal pelaporan keuangan.
- **Tinjauan pembelajaran dan evaluasi triwulanan dan tahunan** terhadap kemajuan program berdasarkan indikator keluaran dan intervensi. Proses ini akan melibatkan **Kemendikbudristek, Kemenag, serta pemerintah daerah**, serta akan mencakup pengumpulan data kuantitatif yang diuraikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lokasi geografis.

- **Evaluasi tengah program (mid-term evaluation)** akan menilai kemajuan menuju pencapaian hasil, mengidentifikasi tantangan dalam desain dan implementasi, serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat diperluas.
- **Evaluasi akhir (final evaluation)** akan menilai pencapaian program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi praktik terbaik, serta memberikan rekomendasi untuk iterasi program berikutnya.

Program ini akan memastikan bahwa **mekanisme akuntabilitas yang efektif dan transparan** tersedia untuk membagikan informasi mengenai tujuan dan hasil program kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Mekanisme ini akan dikembangkan di tingkat komunitas oleh penerima hibah dan sub-hibah untuk **mengelola umpan balik dan keluhan dari masyarakat**, guna memastikan tindakan korektif dapat diambil berdasarkan umpan balik yang diterima.

Seluruh kegiatan REALM akan **selaras dengan Komitmen Akuntabilitas terhadap Populasi yang Terdampak (AAP) dari IASC,¹⁰³ Standar Kemanusiaan Inti (CHS) tentang Kualitas dan Akuntabilitas,¹⁰⁴ serta Panduan Praktik Terbaik IASC mengenai Mekanisme Pengaduan Berbasis Komunitas terhadap Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.^{105&106}**

Mitra utama ekosistem tingkat kabupaten akan **berkomitmen secara formal** untuk memastikan **akuntabilitas terhadap komunitas dan individu yang mereka layani**, dengan menggunakan posisi dan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, mitra pelaksana harus **memastikan adanya dialog yang berkelanjutan dengan komunitas** di semua tahap pelaksanaan dan implementasi program, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mencerminkan **kebutuhan dan prioritas masyarakat**.

Mitra pelaksana akan mempertimbangkan **cara komunikasi yang disukai oleh komunitas**, dengan menyediakan berbagai metode komunikasi yang **inklusif, responsif terhadap gender, ramah anak, dan sesuai dengan konteks budaya**, sehingga memungkinkan keterlibatan masyarakat tanpa rasa takut akan pembalasan. **Diversifikasi metode komunikasi sangat penting** untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi serta menyampaikan masukan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, untuk memastikan bahwa **anak-anak, orang tua, serta mereka yang memiliki keterampilan literasi rendah** dapat memahami informasi yang diberikan, maka bahasa yang sederhana dan visual akan digunakan.

Diskusi kelompok terarah (FGD) akan memastikan representasi yang setara antara anak perempuan, anak laki-laki, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan kelompok minoritas. Grup terpisah akan diadakan agar anak perempuan merasa nyaman berbicara tentang kepentingan dan kebutuhan mereka. **Berbagai bentuk komunikasi dan dialog akan digunakan dengan mempertimbangkan norma sosial yang berlaku.**

¹⁰³ IASC Task Force on Accountability to Affected People

¹⁰⁴ The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability

¹⁰⁵ IASC (2016). *Best Practice Guide Inter-Agency Community-Based Complaints Mechanisms*.

¹⁰⁶ IASC (2019). *Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse*.

Mekanisme akuntabilitas dan pembelajaran akan mencakup:

- Pembentukan mekanisme umpan balik dimulai dengan pertemuan awal (*kick-off meetings*) dengan komunitas untuk mengidentifikasi metode komunikasi yang mereka pilih. Mekanisme umpan balik yang berkelanjutan seperti hotline, kotak saran, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan anak-anak serta penerima manfaat lainnya akan menggunakan metode yang partisipatif, responsif gender, dan berpusat pada anak.
- Adaptasi kurikulum, asesmen, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, dan lainnya yang dikembangkan melalui program berbasis lokal akan diunggah ke Platform Merdeka Mengajar (PMM) di tingkat lokal dan nasional.
- KREASI berkomitmen untuk menghasilkan bukti serta mendorong pengelolaan pengetahuan mengenai adaptasi pendidikan berbasis daerah dan lokal terhadap reformasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Tim REALM akan memproduksi dan menyebarkan pembelajaran berbasis proyek tahunan di delapan kabupaten, serta menyebarkan riset dan bukti di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten di antara para pemangku kepentingan utama dan mitra utama pendidikan. Selain itu, program ini akan berkontribusi pada pembelajaran sistemik yang mendukung reformasi pendidikan Merdeka Belajar (MB). Tantangan, solusi, pembelajaran, praktik terbaik, serta praktik menjanjikan yang telah diidentifikasi akan disajikan dalam bentuk lokakarya dan webinar di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional melalui MPI/LEG, serta memberikan masukan bagi model pembelajaran DFAT-INOVASI untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan intervensi.
- KREASI akan berpartisipasi dalam penelitian bersama dan berkontribusi pada pembelajaran sistemik terkait literasi dan numerasi dasar bersama INOVASI, sehingga memperkuat pembelajaran sistemik dalam reformasi pendidikan MB. KREASI juga akan mendukung komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk literasi, numerasi, dan penguatan karakter, yang sejalan dengan RPJMN. Penguatan keterampilan dasar di tingkat sekolah dasar dan prasekolah akan disesuaikan dengan kompetensi lebih luas sebagaimana diuraikan dalam RPJPN (2025-2045). Selain itu, KREASI akan mendukung rencana wajib belajar 13 tahun sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN dan kebijakan pendidikan nasional, dengan intervensi yang juga mencakup pendidikan anak usia dini (TK B/RA).
- Pembelajaran juga akan mencakup pengembangan tiga studi kasus, yang akan dikonfirmasi bersama dengan Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group* - TWG). Beberapa topik yang sedang dipertimbangkan meliputi: (1) Studi Kasus terkait intervensi dukungan bagi anak-anak dengan disabilitas; (2) Studi Kasus terkait perubahan iklim dan pendidikan; serta (3) Studi Kasus pendekatan pendidikan dengan perspektif perlindungan anak dan hak-hak anak yang kuat. KREASI melihat pembelajaran ini sebagai peluang untuk memperkuat reformasi MB yang sedang berlangsung.
- Setiap riset lain yang dihasilkan dari program ini akan berkontribusi pada pengelolaan pengetahuan yang berkelanjutan, serta akan didistribusikan kepada pemangku kepentingan pendidikan lokal dan nasional melalui MPI/LEG, guna memberikan kontribusi pada penguatan sektor pendidikan secara lebih luas.

Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan

KREASI dirancang dengan memperhatikan perlindungan anak, orang dewasa, dan staf. Oleh karena itu, KREASI berkomitmen penuh terhadap **program yang aman bagi anak dan orang dewasa**, memastikan bahwa anak-anak dan orang dewasa yang rentan tidak mengalami bahaya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Perlindungan serta penyediaan layanan/solusi yang aman dan setara bagi semua anak, terutama **anak perempuan dan remaja perempuan**, serta orang dewasa yang rentan, khususnya **perempuan dan penyandang disabilitas**, akan menjadi perhatian utama dengan fungsi perlindungan yang diperkuat sebagai bagian dari implementasi program. **PMU akan memiliki Penasihat Perlindungan Anak serta Koordinator Perlindungan Anak di tingkat provinsi** untuk mengelola seluruh kegiatan perlindungan, serta bekerja sama dengan petugas Save the Children lainnya dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan terkait.

Perlindungan Anak (termasuk PSEAH - Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual)

KREASI akan memastikan bahwa langkah-langkah khusus terkait kesadaran, rencana manajemen risiko, dan mekanisme akuntabilitas telah tersedia untuk mencegah, melaporkan, dan menindaklanjuti kasus perlindungan anak dan orang dewasa. Semua komponen program dirancang dengan mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan anak dan orang dewasa. Setiap mitra konsorsium memiliki kebijakan perlindungan anak dan orang dewasa yang kuat, termasuk kode etik dan prosedur yang berlaku bagi semua staf dan afiliasi mereka. Setiap konsultan, vendor, dan pemasok juga diwajibkan untuk menyetujui kebijakan perlindungan ini sebagai bagian dari perjanjian kerja sama. Jika diperlukan, kontrak harus mencakup versi terjemahan dari kebijakan perlindungan terkait, yang harus ditandatangani sebagai bentuk persetujuan. Mitra bertanggung jawab untuk melindungi semua individu, baik anak-anak maupun orang dewasa, dari segala bentuk bahaya yang diakibatkan oleh program atau operasional mereka.

PMU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mitra pelaksana memiliki kapasitas dan mekanisme yang memadai untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan anak dan orang dewasa. Penasihat Perlindungan Anak dalam PMU akan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap mitra pelaksana memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur perlindungan yang kuat selama program berlangsung. Mitra akan diminta memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan perlindungan anak dan orang dewasa, serta menerima dukungan peningkatan kapasitas jika ditemukan kekurangan. Semua staf atau relawan, serta siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan program, wajib menyelesaikan pelatihan perlindungan anak dan orang dewasa sebagai syarat utama.

Matriks risiko program mengidentifikasi risiko perlindungan anak dan orang dewasa serta upaya mitigasi risiko. Sebagai bagian dari langkah mitigasi ini, mitra diwajibkan untuk menyediakan bukti kebijakan dan prosedur perlindungan anak dan orang dewasa bagi diri mereka sendiri

maupun calon mitra sebelum menandatangani perjanjian hibah. Kebijakan ini harus mencakup praktik rekrutmen yang aman, kode etik perlindungan anak dan PSEA/PSH (Pelecehan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender), serta prosedur pelaporan, rujukan, dan disipliner. Mitra akan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko khusus digunakan untuk melindungi anak-anak, orang dewasa yang rentan, dan komunitas penyandang disabilitas, termasuk melalui protokol khusus untuk setiap aktivitas dan lokasi jika diperlukan.

Setiap mitra akan menetapkan kebijakan rujukan perlindungan anak dan orang dewasa, dengan focal points yang ditunjuk untuk memastikan rujukan yang aman, etis, dan dapat diakses, serta memastikan tindak lanjut yang tepat. Mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan alternatif akan disediakan oleh mitra di setiap provinsi. Anak-anak dan komunitas akan dilibatkan dalam perancangan mekanisme ini dan diinformasikan mengenai cara mereka dapat menyampaikan keluhan atau umpan balik. Program ini akan menyediakan informasi yang jelas bagi anak-anak dan komunitas mengenai hak-hak mereka, langkah-langkah yang diambil untuk melindungi mereka, serta perilaku yang diharapkan dari staf mitra penerima hibah dan mitra pelaksana.

Setiap laporan terkait perlindungan anak dan orang dewasa akan ditindaklanjuti dengan cara yang cepat, rahasia, dan aman. Semua laporan akan dicatat sesuai dengan praktik terbaik dalam perlindungan data, dan dimonitor untuk mengidentifikasi tren serta peluang dalam meningkatkan praktik organisasi mitra. Semua informasi yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat implementasi program, guna memastikan bahwa anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang rentan terlindungi secara optimal.

Perlindungan Orang Dewasa (Perempuan dan Orang Dewasa Rentan Lainnya, termasuk PSEAH)

Setiap mitra memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur yang kuat untuk memastikan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, serta pelecehan seksual terhadap anak perempuan dan laki-laki dari segala usia (di bawah kebijakan Perlindungan Anak), serta terhadap orang dewasa (secara terpisah di bawah PSEAH). Mitra akan mengikuti pendekatan yang sama seperti dalam perlindungan anak, memastikan bahwa semua mitra pelaksana memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur yang serupa dalam melindungi terhadap eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual. Mitra akan bekerja untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dalam menerapkan prosedur ini dan menetapkan langkah-langkah mitigasi. Ini termasuk memastikan adanya mekanisme di provinsi sasaran yang dapat secara aman merujuk korban/penyintas ke layanan khusus, termasuk layanan kesehatan mental dan psikososial (MHPSS) serta layanan kesehatan.

Perhatian khusus akan diberikan untuk melindungi komunitas, terutama orang dewasa yang rentan seperti perempuan muda, dari paparan yang tidak perlu dalam partisipasi mereka dalam kegiatan program melalui komunikasi program. Semua komunikasi eksternal akan ditinjau oleh

penerima hibah dan pakar komunikasi di tingkat lembaga mereka untuk memastikan bahwa penerima manfaat, komunitas mereka, dan kegiatan pendidikan mereka tidak terekspos secara tidak perlu. Selain itu, setiap mitra pelaksana diwajibkan menerapkan langkah-langkah keamanan data yang ketat untuk mencadangkan informasi penting di lokasi penyimpanan yang aman serta mengenkripsi informasi yang dapat membahayakan penerima manfaat atau komunitas mereka.

Keberlanjutan dan Efektivitas Hibah

KREASI berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan intervensi program guna berkontribusi terhadap perubahan transformatif dan sistemik. Program ini memiliki keselarasan yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Indonesia, serta dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk periode 2020-2024. Yang terpenting, program ini mendukung reformasi unggulan **Merdeka Belajar**, yang menjadi inti dari kebijakan peningkatan kualitas pendidikan terkait kurikulum, asesmen, praktik pengajaran, dan kepemimpinan pendidikan. Regulasi kementerian serta reformasi unggulan **Merdeka Belajar** diterapkan di tingkat daerah dan sekolah melalui KREASI, berkontribusi terhadap pencapaian efek transformatif yang diharapkan dalam reformasi MB.

KREASI akan menggunakan indikator pemantauan dan evaluasi dari Kemendikbudristek dan Kemenag untuk menilai efektivitas program. Program ini juga mencakup perlindungan anak, yang telah menjadi prioritas antarkementerian, serta mengintegrasikan akses pendidikan yang inklusif dengan mempertimbangkan gender, disabilitas, dan keberagaman sosial, serta mengatasi prioritas perubahan iklim yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, KREASI secara langsung selaras dengan tujuan dan hasil antara dari **Partnership Compact**, serta dengan program unggulan **INOVASI** (lihat Tabel 2).

Karena sifat desentralisasi layanan pendidikan di Indonesia, keberlanjutan tidak hanya melibatkan keselarasan di tingkat nasional tetapi juga harus mencakup keselarasan di tingkat provinsi dan kabupaten, dengan penekanan pada peningkatan kebijakan dan praktik di tingkat lokal. Tantangan dalam desentralisasi layanan pendidikan memerlukan pendekatan yang matang dalam mengoordinasikan berbagai mitra lokal, sebagaimana yang tercermin dalam model fasilitator ekosistem tingkat kabupaten yang dikembangkan oleh Save the Children. Dengan melibatkan berbagai mitra, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, kelompok keagamaan, dan sektor swasta, program ini memaksimalkan upaya untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dalam kasus di mana pemangku kepentingan membutuhkan dukungan tambahan, KREASI akan membangun kapasitas lokal melalui bantuan teknis serta memberikan pelatihan dan supervisi kepada pemangku kepentingan utama di sektor pendidikan, seperti guru, kelompok kerja guru, kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, pejabat pendidikan di tingkat kabupaten dan provinsi, penyedia pelatihan, serta mekanisme koordinasi berbasis desa dan komunitas.

Pendekatan berbasis komunitas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa inisiatif pendidikan relevan dengan konteks dan prioritas lokal. Dengan melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya komunitas, upaya bantuan dapat mendorong rasa kepemilikan dan keberlanjutan di tingkat akar rumput.

Kemitraan dengan organisasi non-pemerintah lokal juga memperkuat keterlibatan komunitas dan advokasi, sehingga meningkatkan dampak intervensi serta memperkuat suara anak-anak. Efisiensi biaya dan kesadaran nilai sangat penting dalam mengoptimalkan dampak bantuan pendidikan. Alokasi sumber daya yang ketat, pemilihan intervensi berdampak tinggi, serta proses implementasi yang efisien menjadi inti dari pendekatan ini. Dengan melakukan analisis biaya-manfaat secara menyeluruh dan memfokuskan alokasi hibah kecil pada investasi berkelanjutan, kegiatan program dapat memaksimalkan efektivitasnya sambil memastikan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Hibah kecil akan diberikan sebagai bentuk dukungan awal kepada mitra pelaksana lokal/NGO untuk menciptakan dan/atau melanjutkan praktik terbaik di wilayah yang ditentukan. Dengan menumbuhkan keberlanjutan dan skalabilitas, upaya ini dapat memperluas dampaknya di luar periode program, menciptakan manfaat jangka panjang bagi sektor pendidikan di Indonesia.

Selain itu, proses identifikasi masalah dan tantangan oleh pemangku kepentingan lokal serta penentuan solusi secara mandiri juga membantu dalam menjaga keberlanjutan intervensi program. Melalui berbagai lokakarya diagnostik yang dilakukan sebelum program dimulai serta secara berkala selama program berlangsung, KREASI memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki kendali dalam mengidentifikasi tantangan pendidikan dan merancang cara penyelesaiannya. **Grant Agent** tidak hanya akan mempromosikan dan mengembangkan reformasi **Merdeka Belajar** melalui pembelajaran program yang berkelanjutan serta memanfaatkan semua intervensi pemangku kepentingan pendidikan, tetapi juga terbuka untuk menguji dan mencoba pendekatan baru guna mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Semua temuan dan inovasi akan disebarluaskan secara luas baik di tingkat lokal maupun nasional melalui Kemendikbudristek dan Kemenag untuk mendukung replikasi program di berbagai daerah.

KREASI percaya bahwa keseimbangan antara membangun kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya, serta mendorong dialog kebijakan, adalah pendekatan terbaik untuk mencapai perubahan transformatif dan keberlanjutan. Dengan menitikberatkan pada inisiatif penguatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, pemanfaatan keahlian lokal, serta dialog kebijakan, program ini dapat meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan. Kolaborasi dengan mitra pelaksana lokal serta keselarasan dengan inisiatif seperti INOVASI dan harmonisasi dengan UNICEF, PSPK, serta masukan dari anggota **MPI/LEG** semakin memperkaya upaya program dengan memanfaatkan pengetahuan, jaringan, dan praktik terbaik yang sudah ada.

Melalui pembelajaran bersama dan mobilisasi sumber daya, program ini dapat memberdayakan sistem pendidikan Indonesia untuk berkembang secara mandiri dalam jangka panjang. Tata kelola yang efektif di antara anggota konsorsium yang mengimplementasikan program ini akan

memastikan koordinasi, akuntabilitas, serta koherensi, sehingga memfasilitasi implementasi yang lancar dan memaksimalkan hasil. Melalui upaya bersama ini, program ini diharapkan dapat mengubah kehidupan banyak anak dan membuka jalan menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah. **MPI/LEG** telah terlibat secara aktif dalam perancangan program ini dan diperkirakan akan terus berperan aktif dalam pemantauan implementasi program. **MPI/LEG** juga telah menyatakan dukungannya terhadap KREASI.

— Selesai —